



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 288, 2020

KEMENDAGRI. PP Nomor 13 Tahun 2019.
Laporan dan Evaluasi. Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Peraturan Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 5. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat fungsional pada inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.
 8. Reviu adalah penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
 9. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya.
 10. Tim Nasional adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.
 11. Tim Daerah Provinsi adalah tim yang membantu gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam

melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.

BAB II
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Muatan

Pasal 2

- (1) LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:
 - a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.
- (3) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja makro;
 - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
- (4) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (5) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan

- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (6) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.
 - (7) Laporan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. kendala penerapan standar pelayanan minimal; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.
 - (8) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 3

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
- b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
- c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
- d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
- f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD.
- (2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun.
- (3) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun.
- (4) Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas:
 - a. inspektorat daerah;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - d. biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten/kota; dan
 - e. perangkat daerah lainnya.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah.

- (2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP inspektorat daerah.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan data dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyiapan data; dan
 - b. kompilasi data.
- (2) Penyiapan dan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di provinsi dan unit kerja perangkat gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Pasal 7

Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh tim penyusun LPPD.

Pasal 8

- (1) Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tidak menerbitkan data yang diperlukan untuk penyusunan LPPD, pemerintah daerah menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD.

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh APIP inspektorat daerah.
- (2) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
- (3) Data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah jika:
 - a. data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data; dan
 - c. metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan.
- (4) Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP inspektorat daerah dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.

Pasal 10

LPPD disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penyampaian

Pasal 11

- (1) LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

- (2) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui sistem informasi pemerintahan daerah.
- (5) Dalam hal penyampaian LPPD dilakukan secara daring, waktu penyampaian LPPD yaitu terhitung sejak tanggal dokumen diunggah dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala daerah yang terlambat menyampaikan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dinyatakan tidak menyampaikan LPPD.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

Pasal 13

Menteri meneruskan informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Muatan

Pasal 14

- (1) Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- (2) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemerintah daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi.

- (4) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 15

Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik.

Pasal 17

LKPJ disusun menggunakan format sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penyampaian

Pasal 18

- (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang

dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.

Pasal 19

- (1) Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (2) Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan perwakilan rakyat daerah menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- (4) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (5) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kepala daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, kepala daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh kepala daerah yang baru atau pejabat pengganti.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Muatan

Pasal 21

RLPPD memuat:

- a. capaian kinerja makro;
- b. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya;
- d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. inovasi daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 22

- (1) Penyusunan RLPPD dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan RLPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) RLPPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penyampaian

Pasal 23

- (1) RLPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat.
- (2) RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui:
 - a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online;
 - b. papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan
 - c. website resmi pemerintah daerah.
- (3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara

keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama.
- (3) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Sasaran Penilaian

Pasal 25

- (1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai:
 - a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan
 - b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.
- (4) Penilaian capaian IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan:
 - a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan

- b. bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan.
- (5) IKK dan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dirubah, ditambah dan/atau disempurnakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian serta mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Uraian indikator dan bobot nilai untuk indikator kinerja makro dan IKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 26

- (1) EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.
- (2) EPPD provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) EPPD kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi berdasarkan penugasan dari gubernur.
- (4) Pelaksanaan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk Tim Daerah Provinsi.

Pasal 27

- (1) Tim Nasional EPPD melakukan EPPD provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun.
- (2) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terdiri atas:
 - a. Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - c. Kementerian Keuangan;

- d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - f. Badan Pusat Statistik.
- (3) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh badan hukum independen.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat Tim Nasional EPPD yang berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Tim Nasional dalam melakukan EPPD provinsi melaksanakan:
- a. pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
 - b. validasi terhadap hasil EPPD kabupaten/kota yang disampaikan oleh tim daerah;
 - c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah provinsi kepada Menteri; dan
 - d. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah provinsi yang di evaluasi sebagai umpan balik.
- (6) Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Nasional dilaporkan kepada Menteri berupa laporan hasil evaluasi masing-masing pemerintah daerah provinsi.
- (7) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Tim Nasional melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional yang terdiri atas:
- a. peringkat kinerja provinsi;
 - b. peringkat kinerja kabupaten; dan
 - c. peringkat kinerja kota.

- (2) Tim Nasional dalam melakukan penentuan peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. menghitung nilai kinerja provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator dan bobot yang telah ditentukan; dan
 - b. melakukan pemeringkatan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan skor dan status kinerja pemerintah daerah.
- (3) Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional yang telah ditentukan oleh Tim Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (4) Metode penghitungan nilai kinerja dan penentuan peringkat kinerja provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Tim Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), terdiri atas:
 - a. gubernur selaku wakil pemerintah pusat selaku penanggung jawab;
 - b. sekretaris daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - c. inspektur daerah selaku wakil ketua merangkap anggota;
 - d. kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi selaku anggota;
 - e. kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan selaku anggota;
 - f. kepala dinas pengelolaan keuangan daerah selaku anggota;
 - g. kepala badan pusat statistik provinsi selaku anggota; dan
 - h. pejabat daerah lainnya.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Daerah Provinsi beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Tim Daerah Provinsi dalam melakukan EPPD kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota kepada gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
 - c. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dievaluasi sebagai umpan balik.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas tim daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat tim daerah EPPD yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.
- (5) Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Daerah Provinsi dilaporkan kepada gubernur, berupa laporan hasil evaluasi untuk masing-masing kabupaten/kota.
- (6) Laporan hasil evaluasi untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh gubernur kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 30

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada Presiden.
- (3) Penyampaian hasil EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.

Pasal 31

Hasil EPPD digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan:

- a. pertimbangan pemberian penghargaan;
- b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
- c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

BAB VI

JENIS PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Presiden memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi berdasarkan hasil EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atas usulan Menteri.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan aspek ketaatan hukum.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tanda kehormatan samkaryanugraha berupa parasamya purnakarya nugraha kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan satyalancana karya bhakti praja nugraha kepada kepala daerah.
- (4) Pemberian penghargaan kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dan diberikan pada rangkaian peringatan hari otonomi daerah.
- (6) Penghargaan kepada daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam

pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 33

Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan penghargaan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ dan RLPPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi DKI Jakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan daerah tersebut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada pada tanggal 06 Maret 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal **27 Maret 2020**

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT SISTEMATIKA

BAB I

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

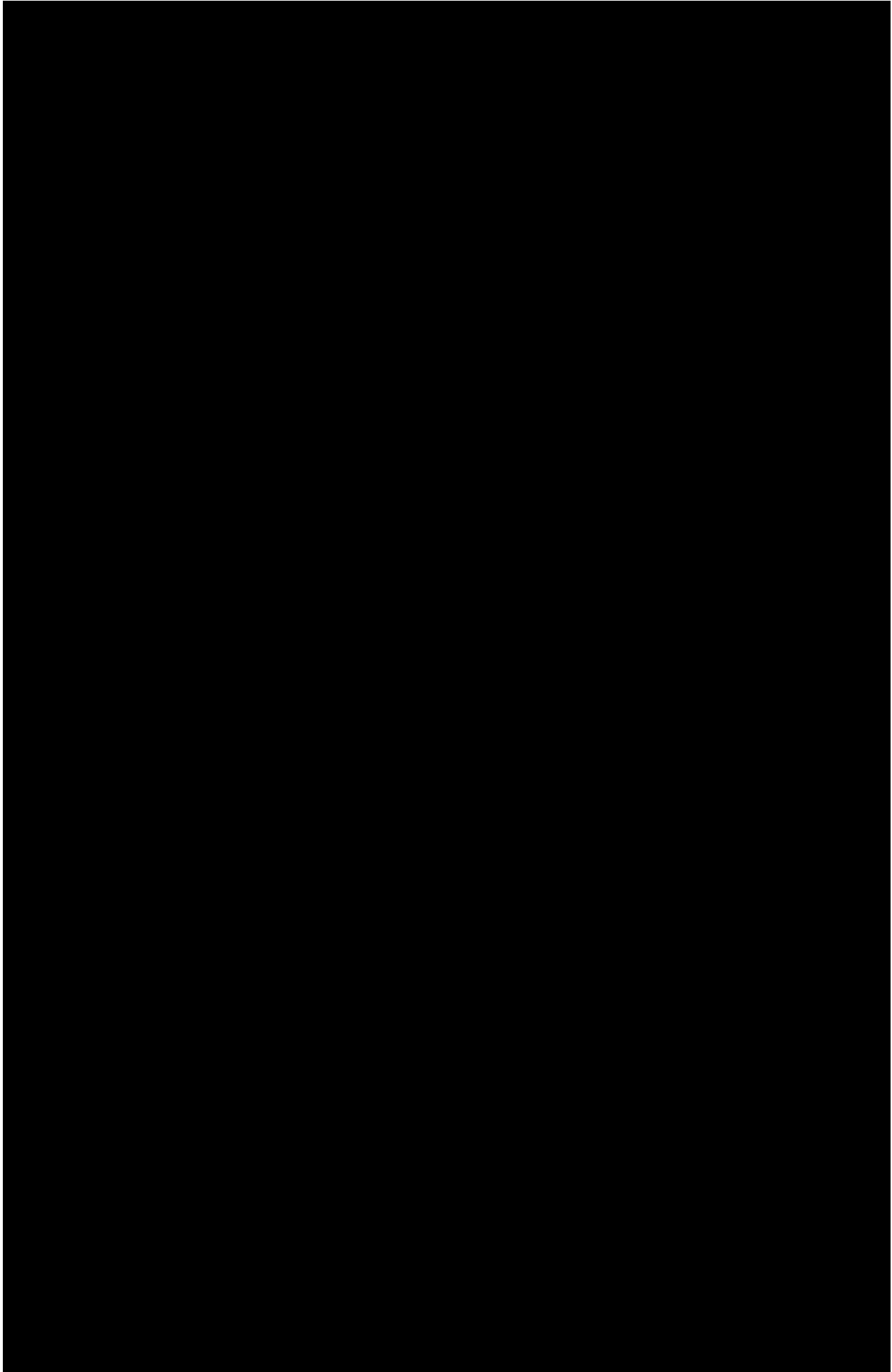
Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

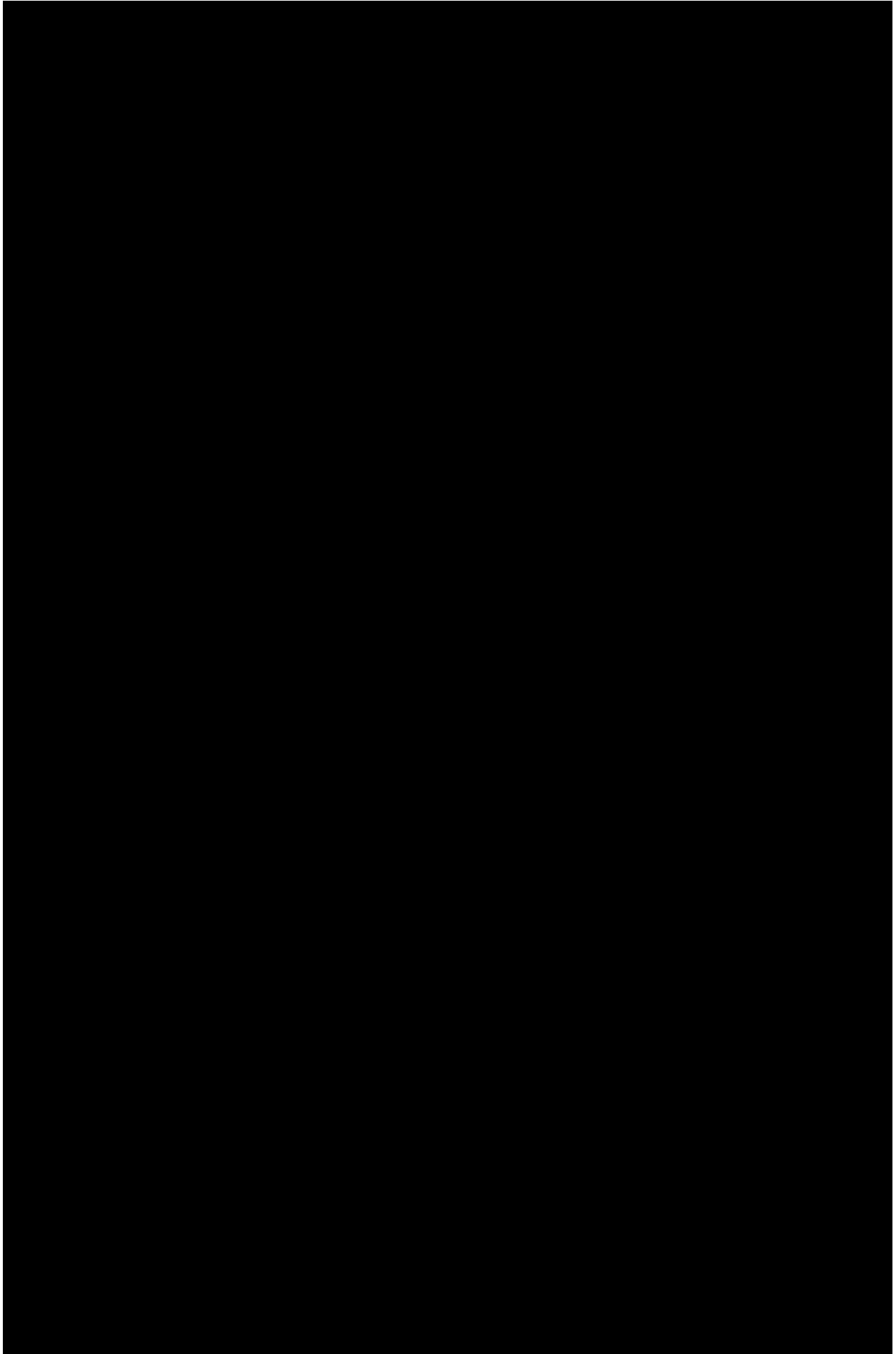
- a. undang-undang pembentukan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kabupaten/kota (untuk provinsi);
- e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
- f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

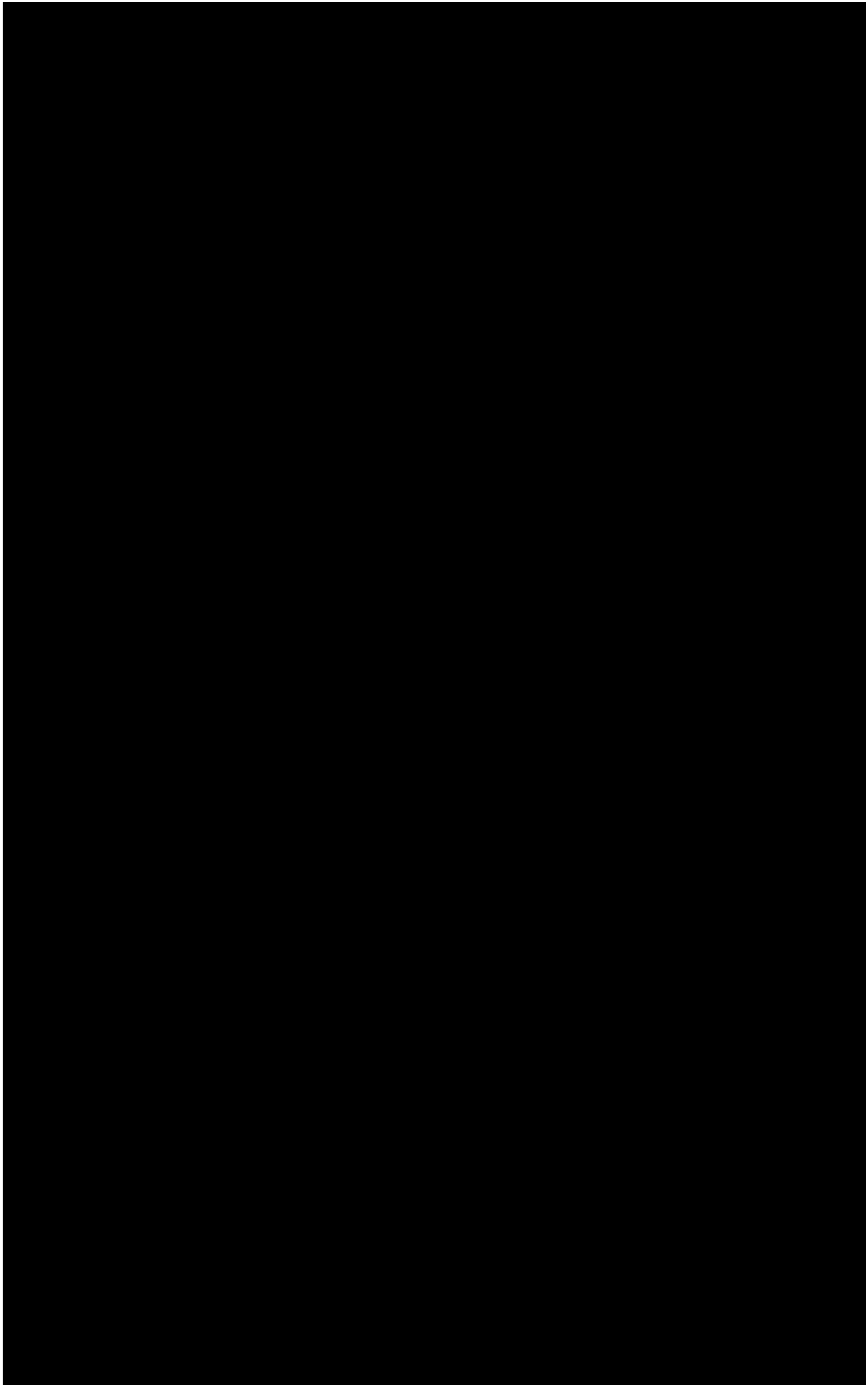
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

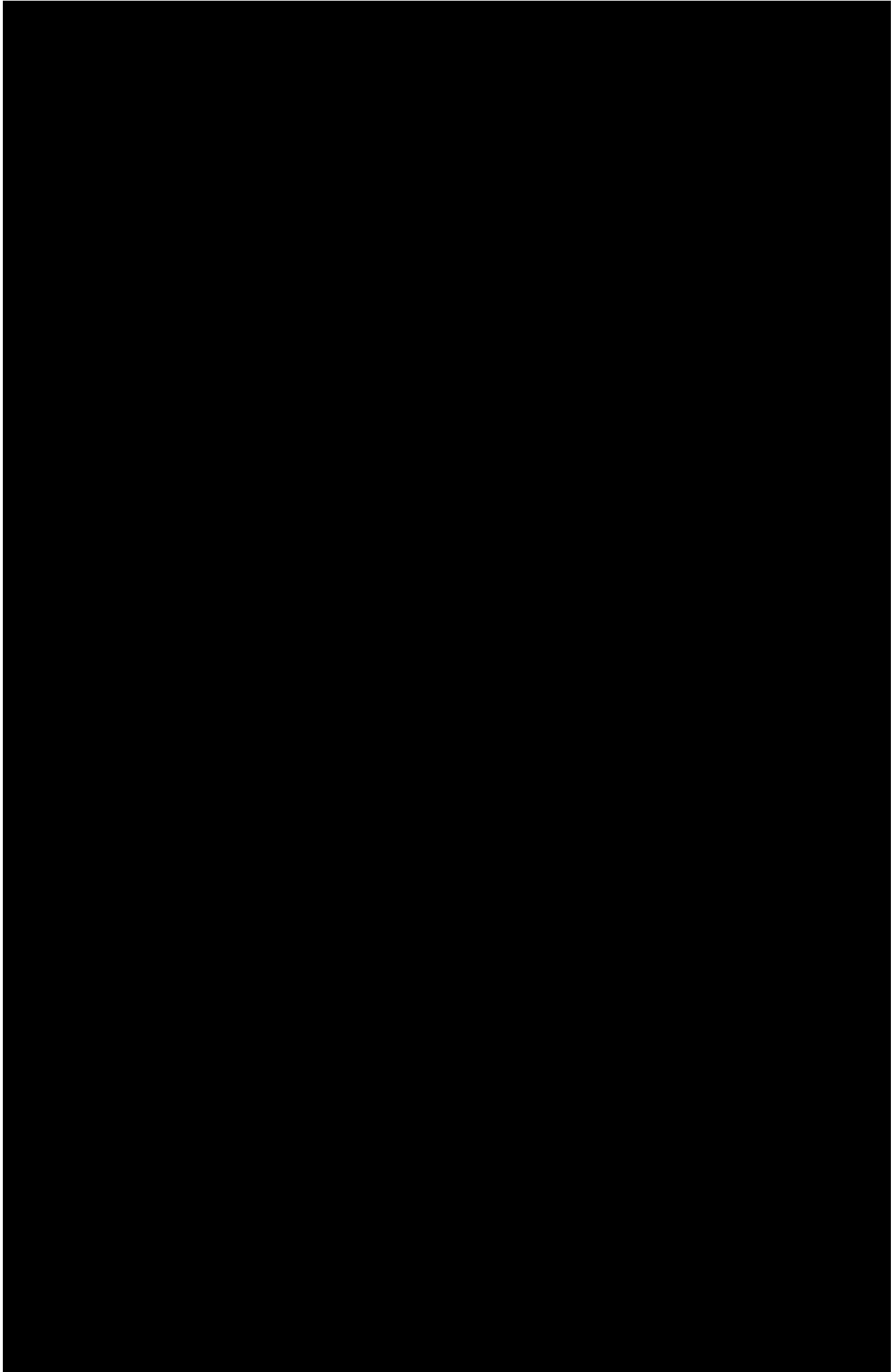
Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

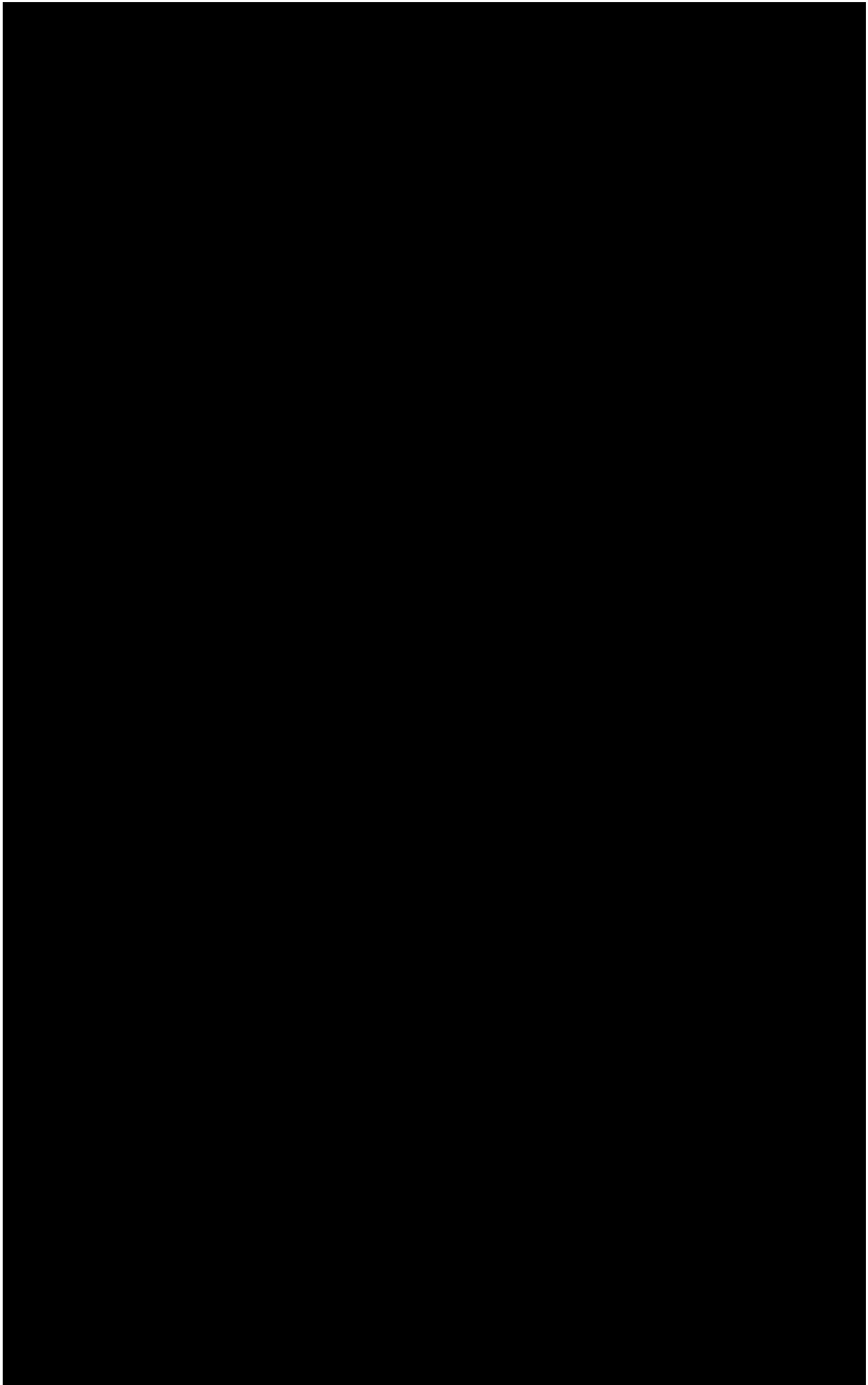
- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan

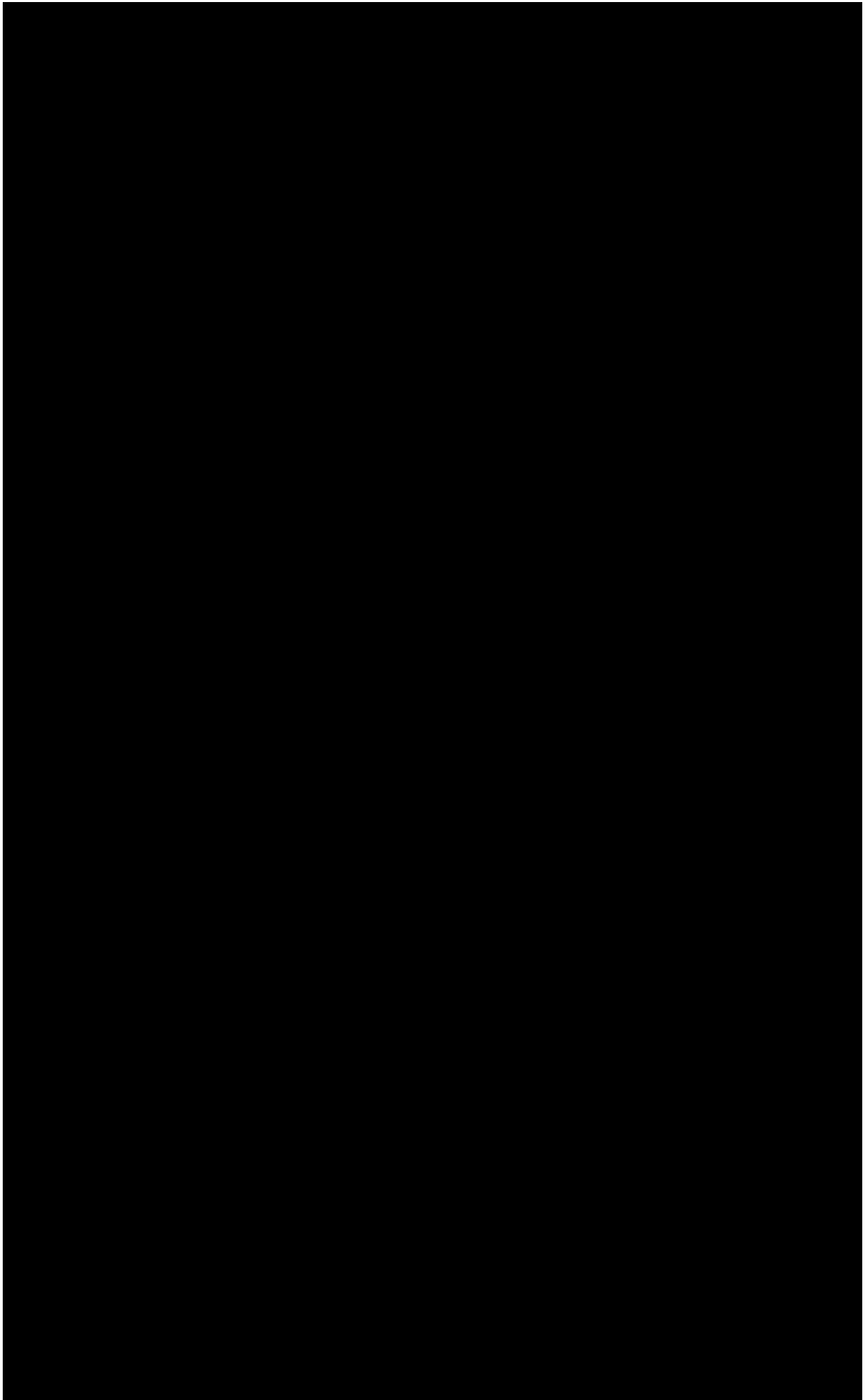


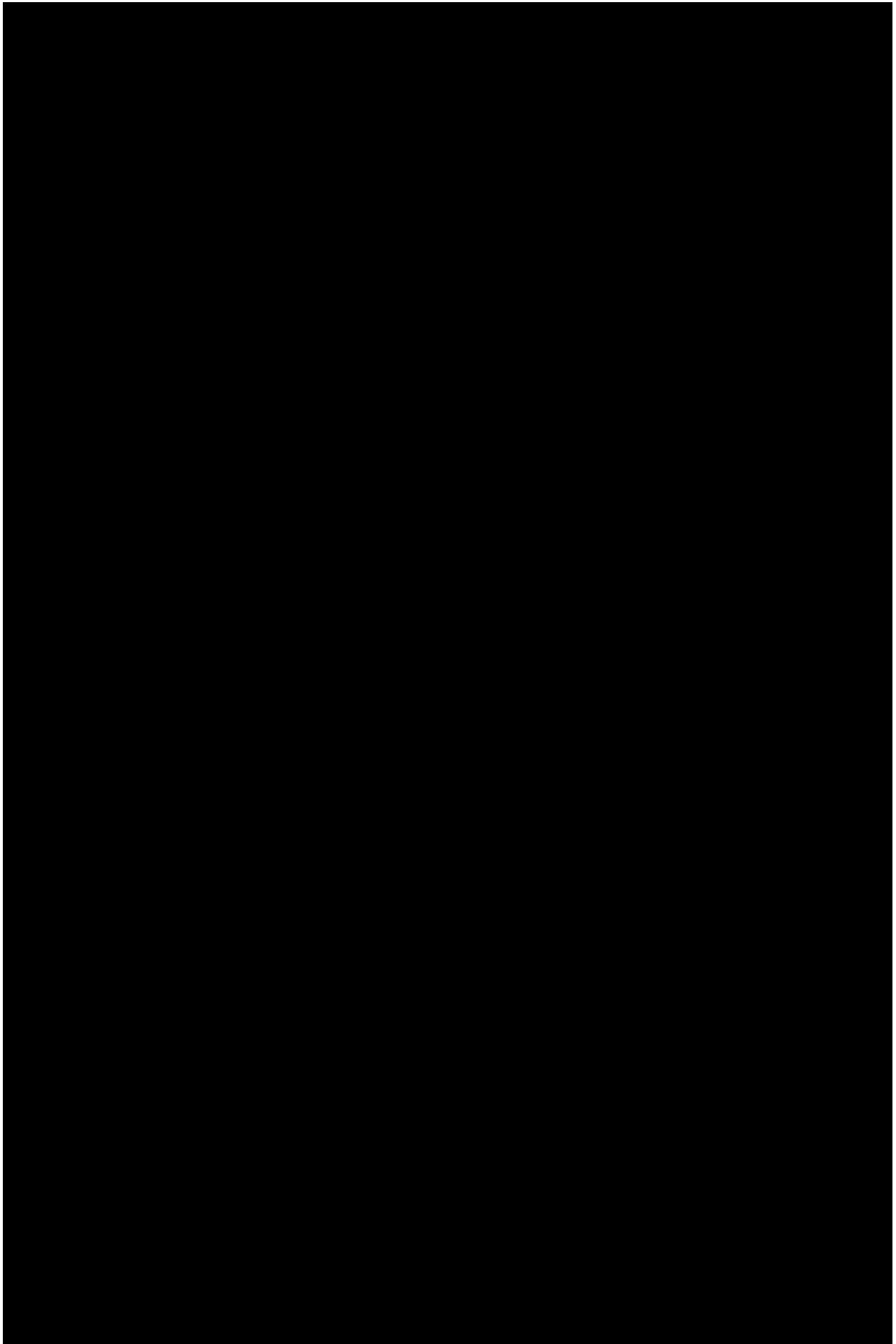


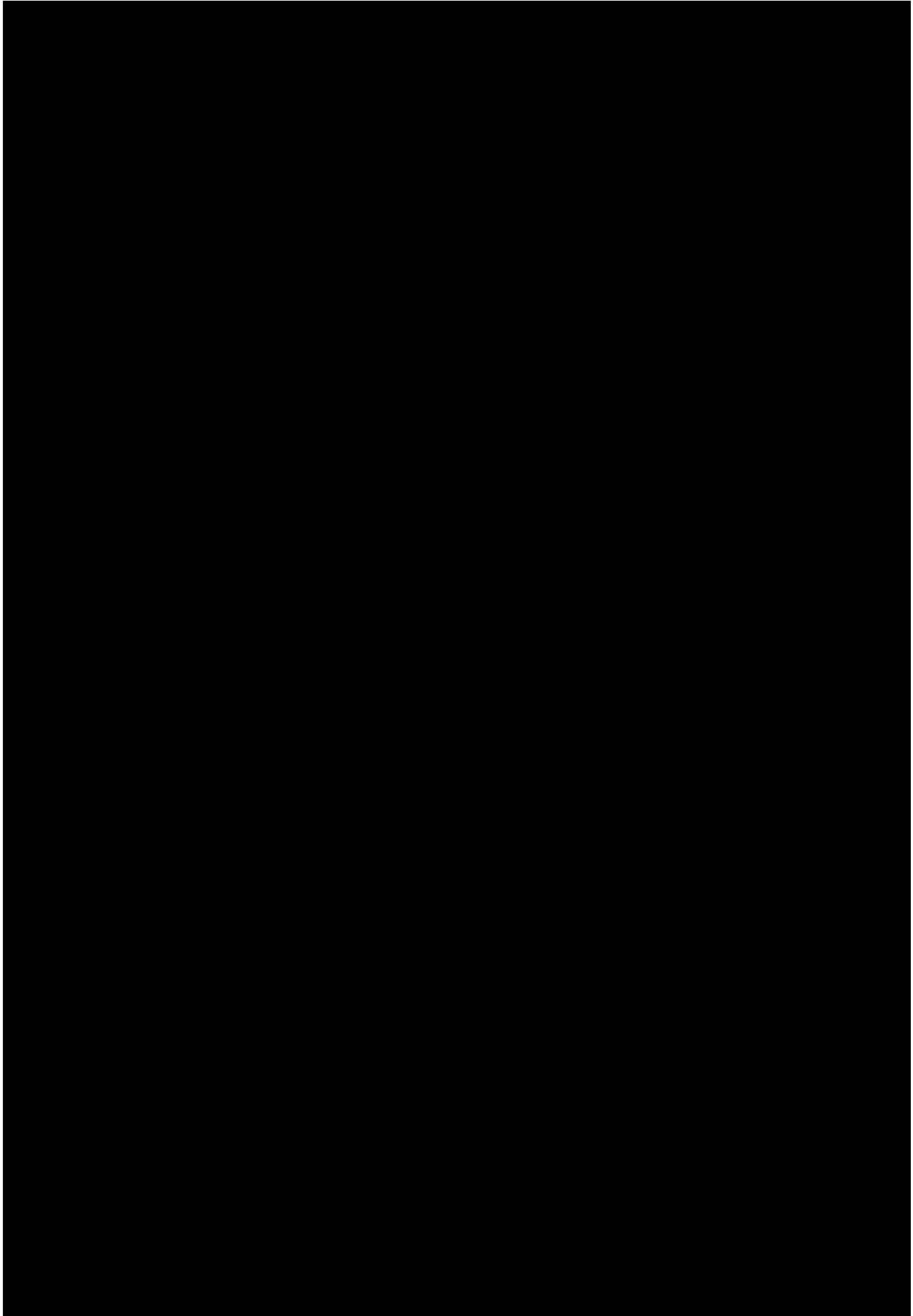












BAB II
SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. undang-undang pembentukan daerah;
- b. data geografis wilayah;
- c. jumlah penduduk;
- d. jumlah kecamatan dan desa/kelurahan (untuk kabupaten/kota);
- e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
- f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

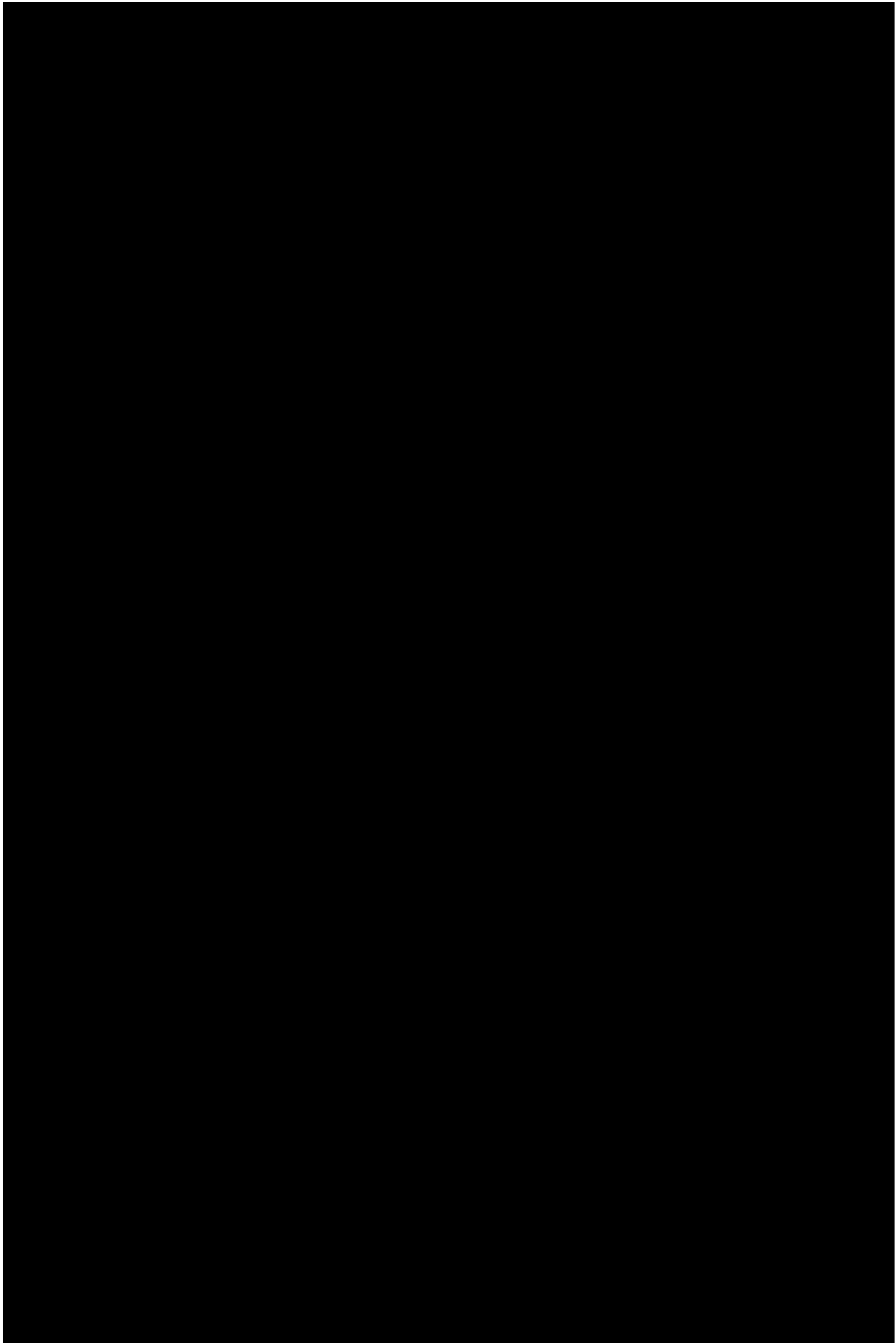
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

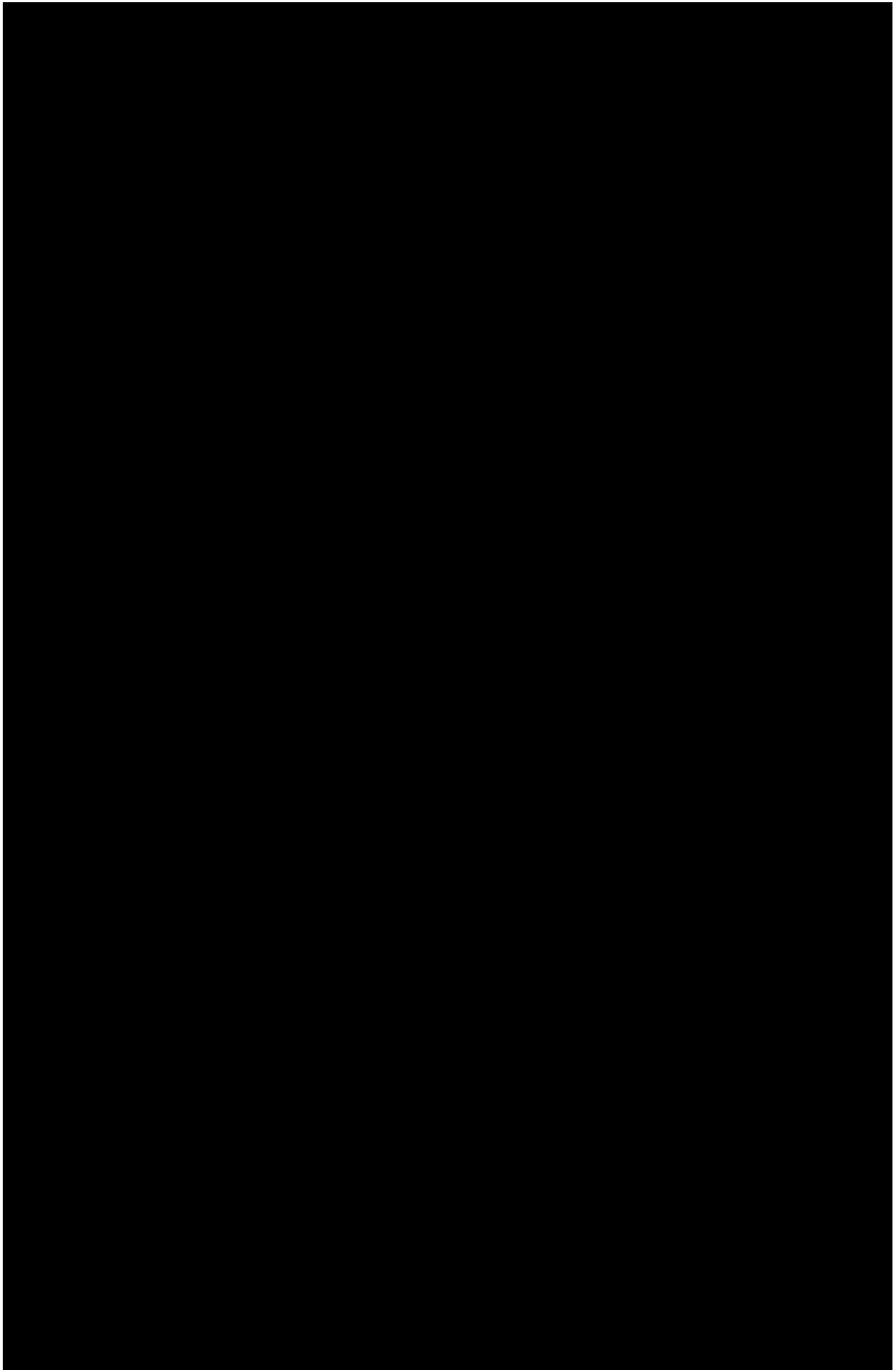
Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

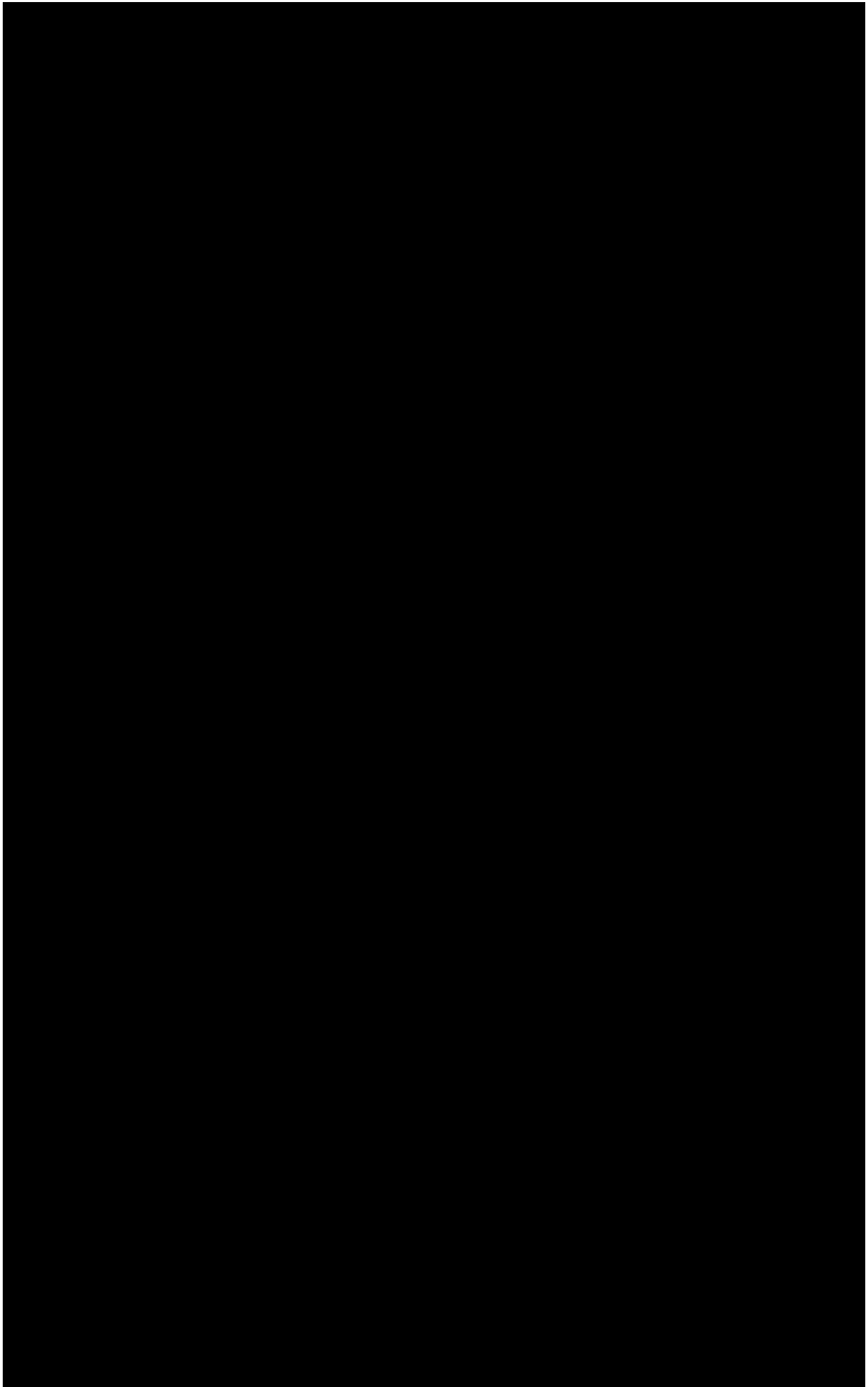
- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. visi dan misi kepala daerah;
- c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

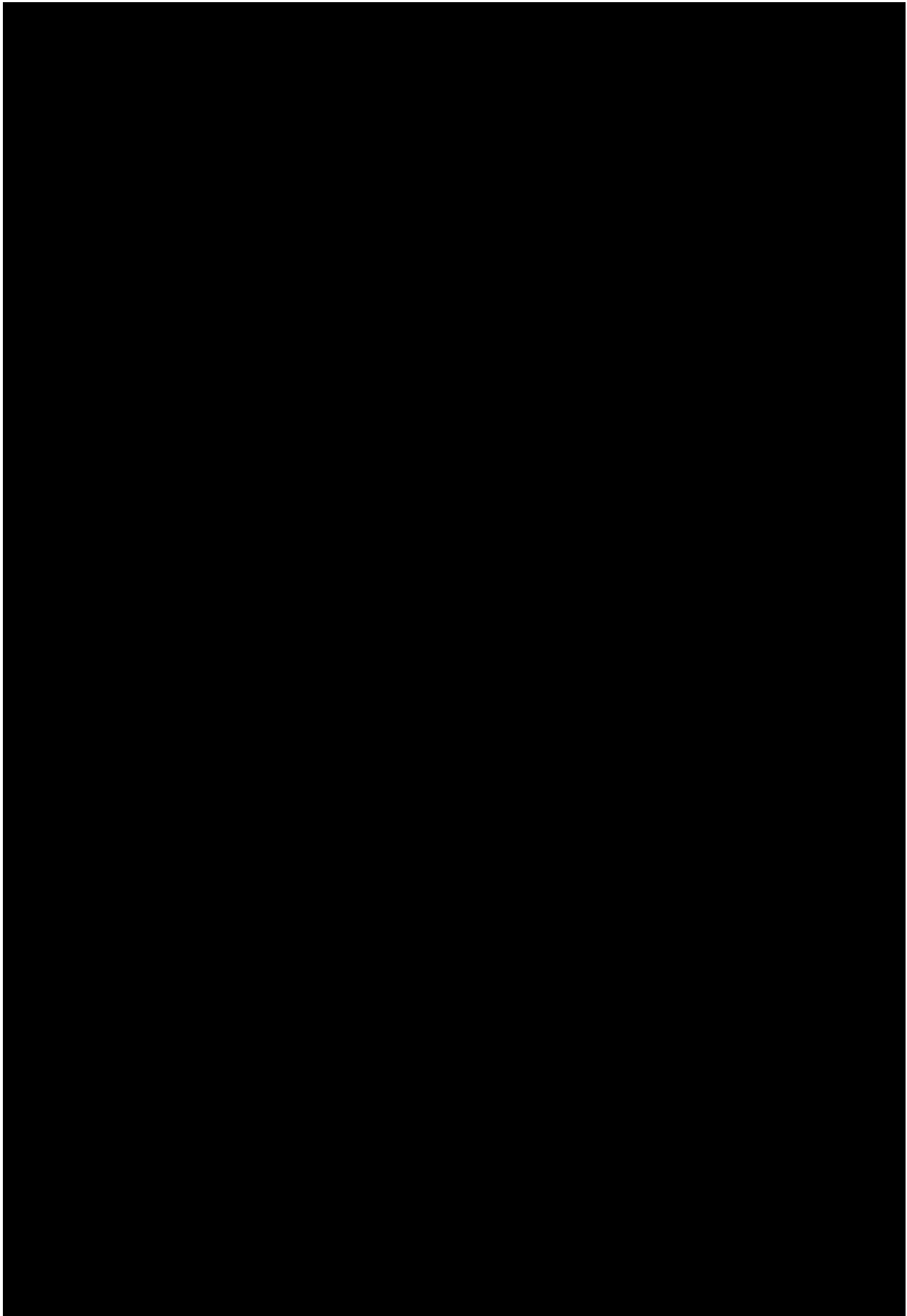
1.1.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

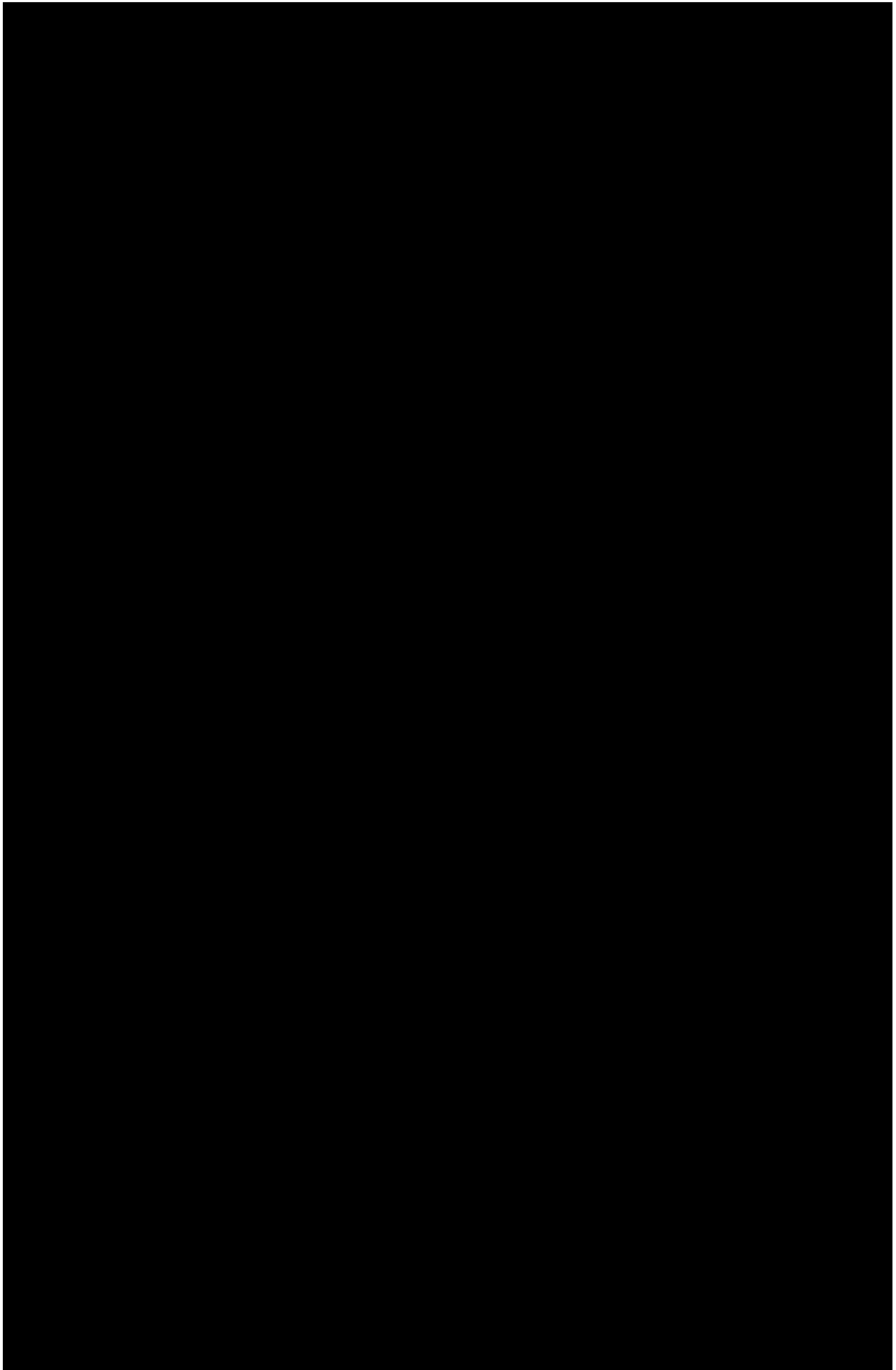
Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan pencapaian standar pelayanan minimal, dasar penetapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana pencapaian dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1

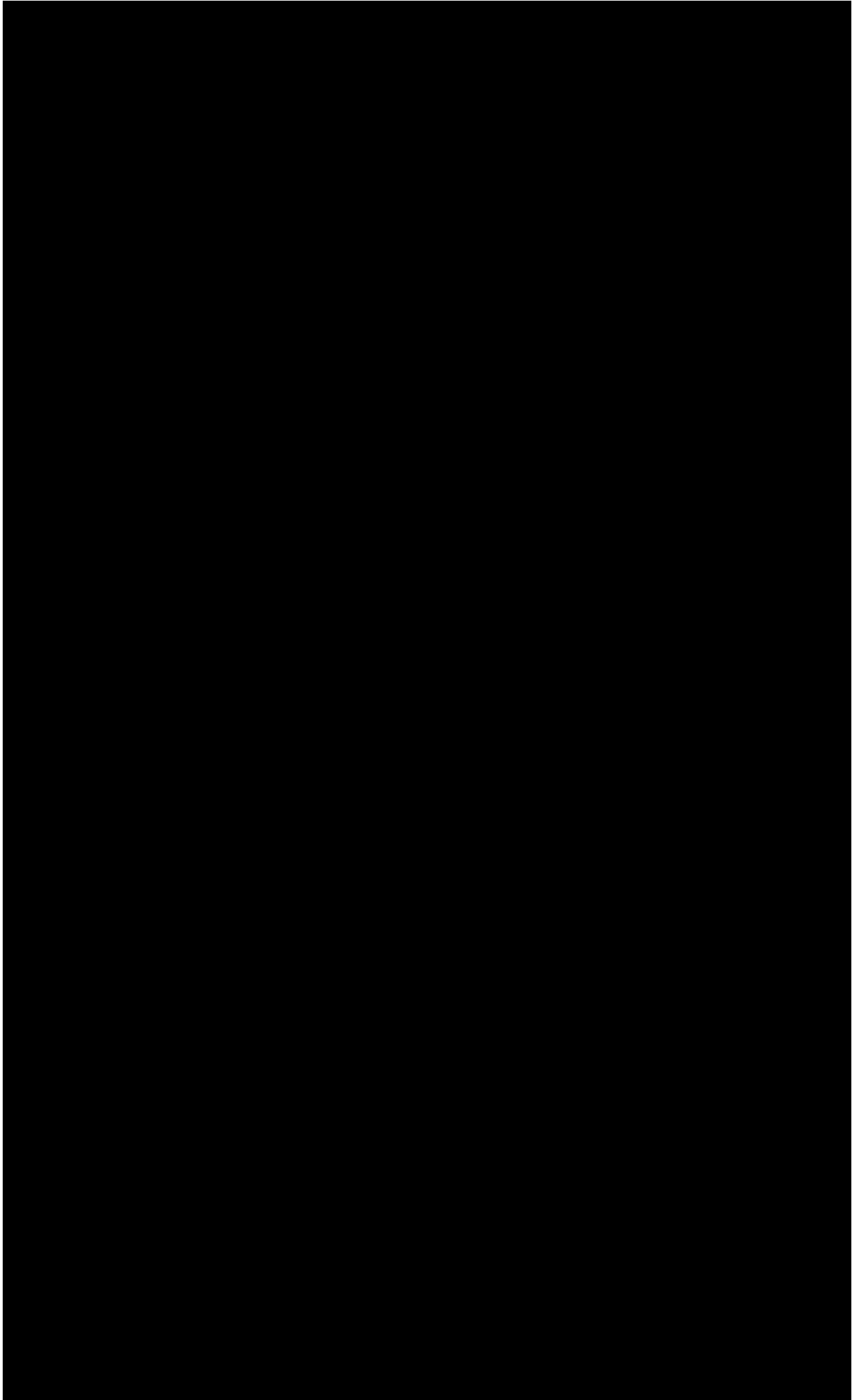


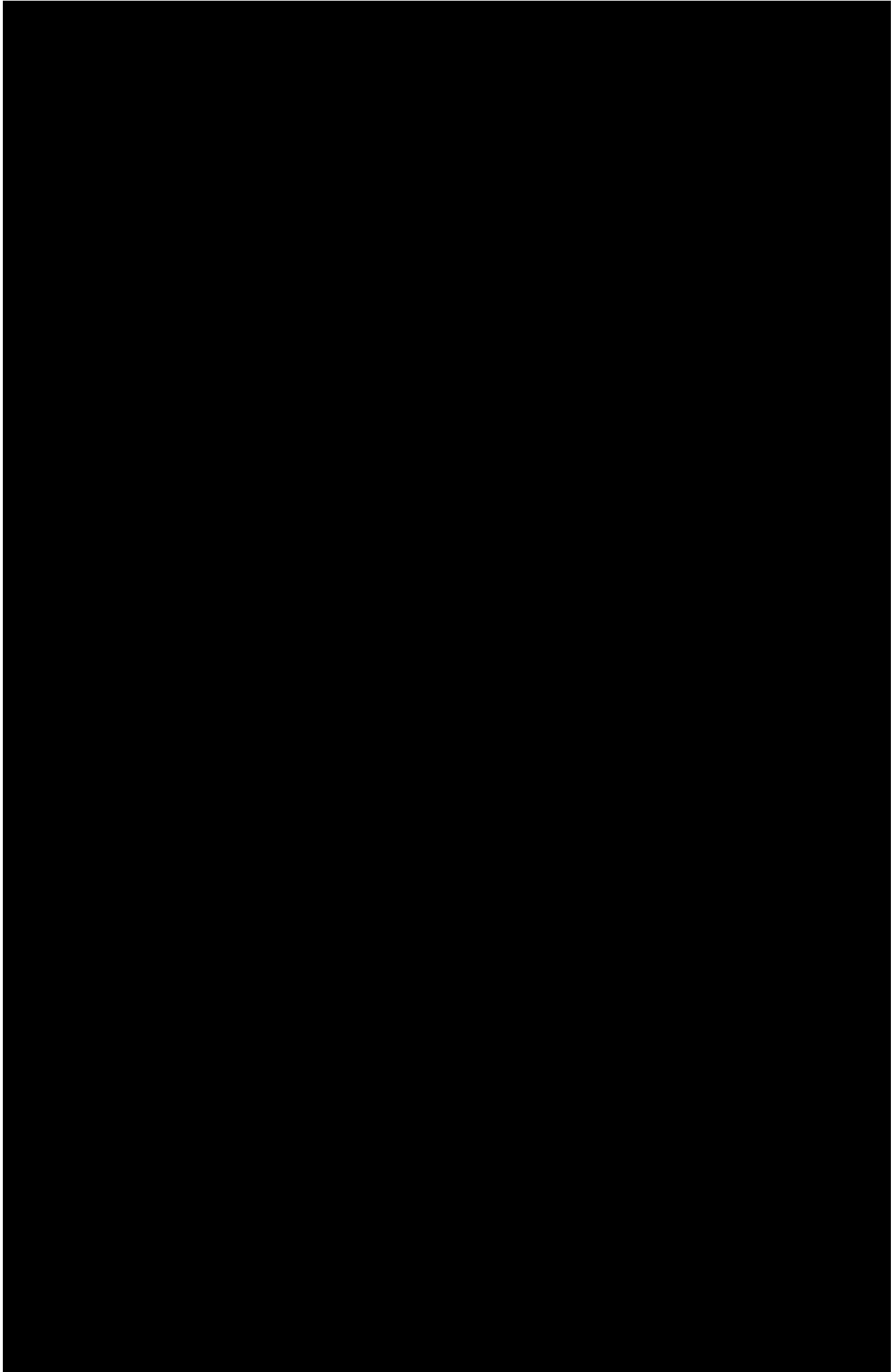


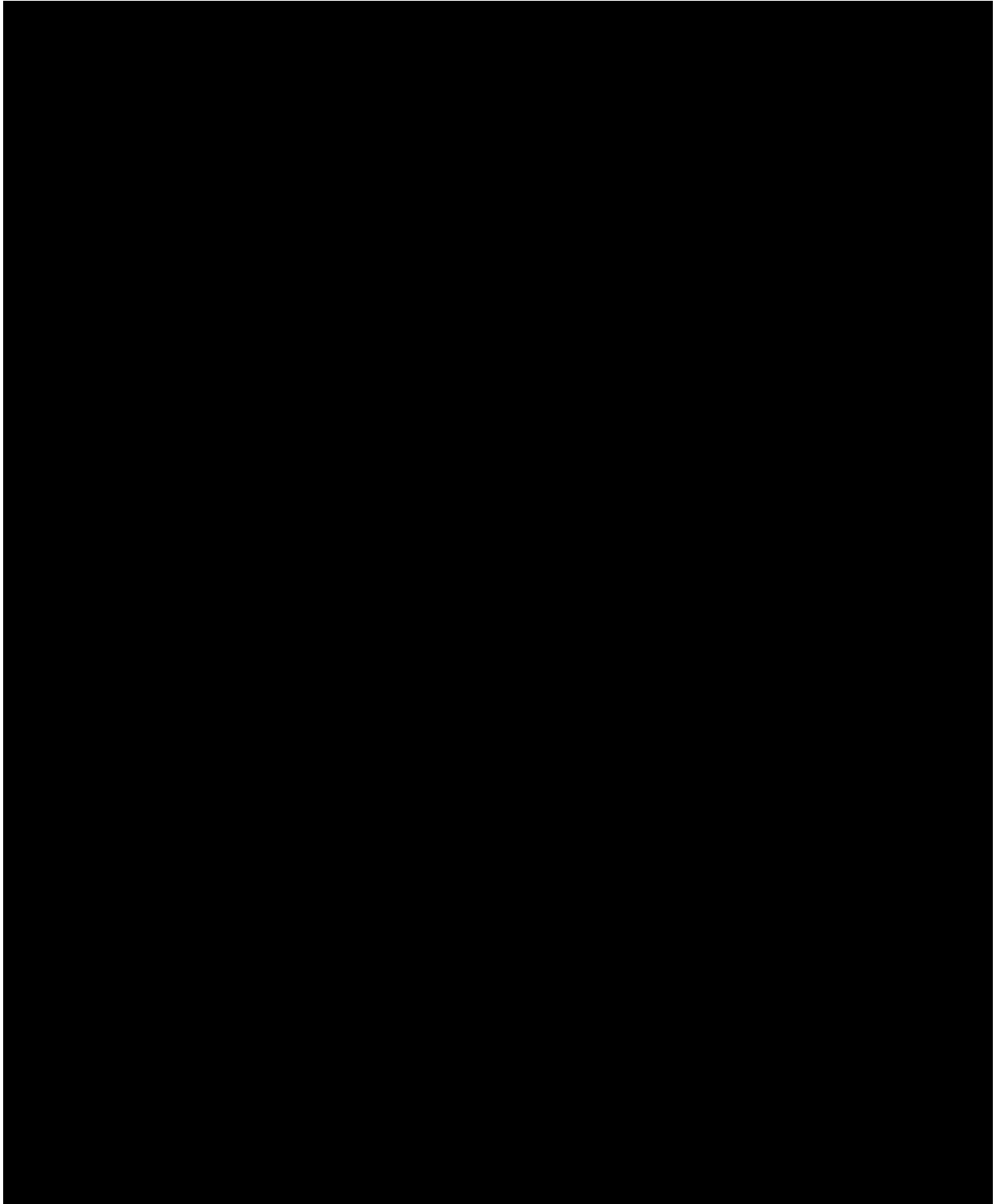


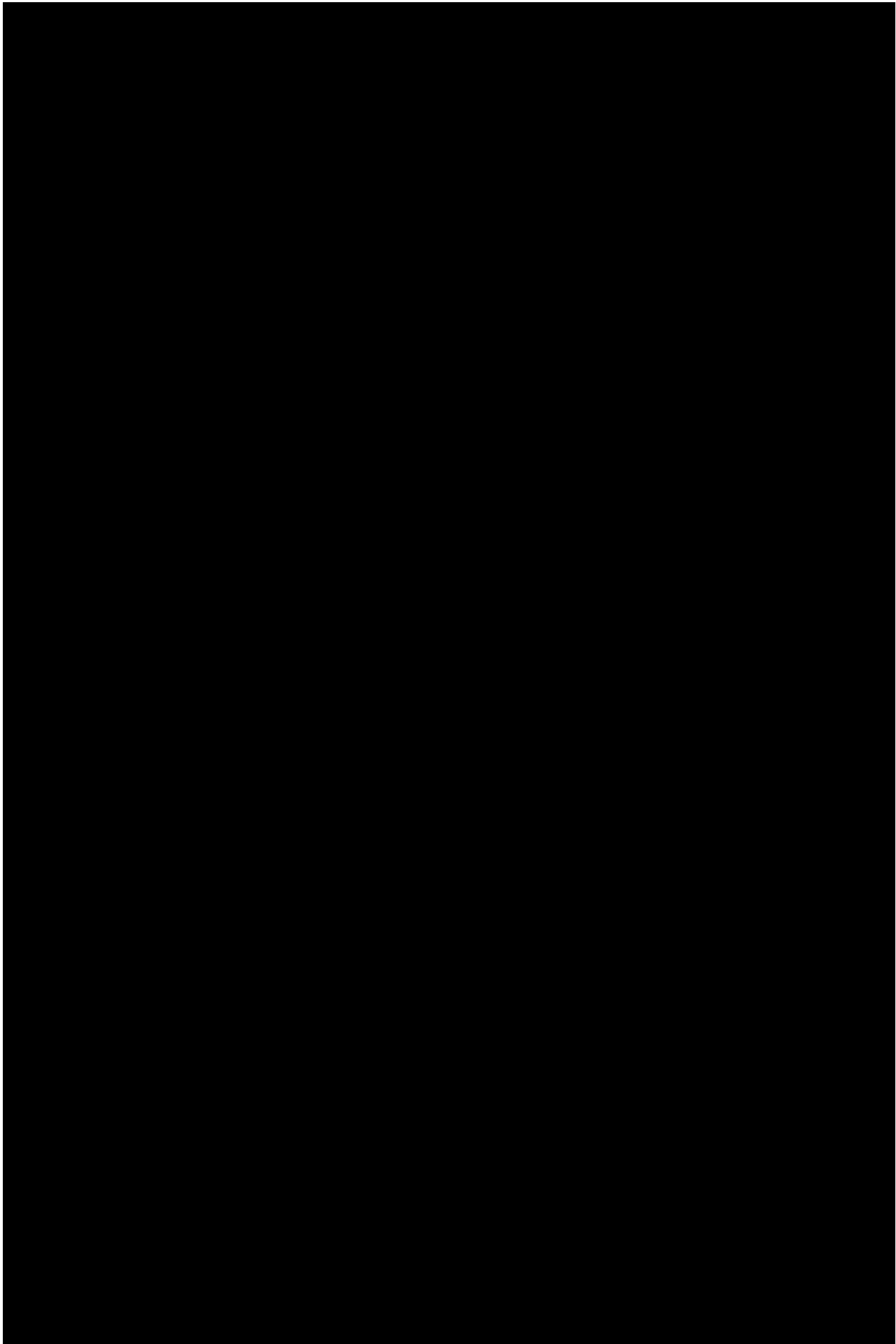


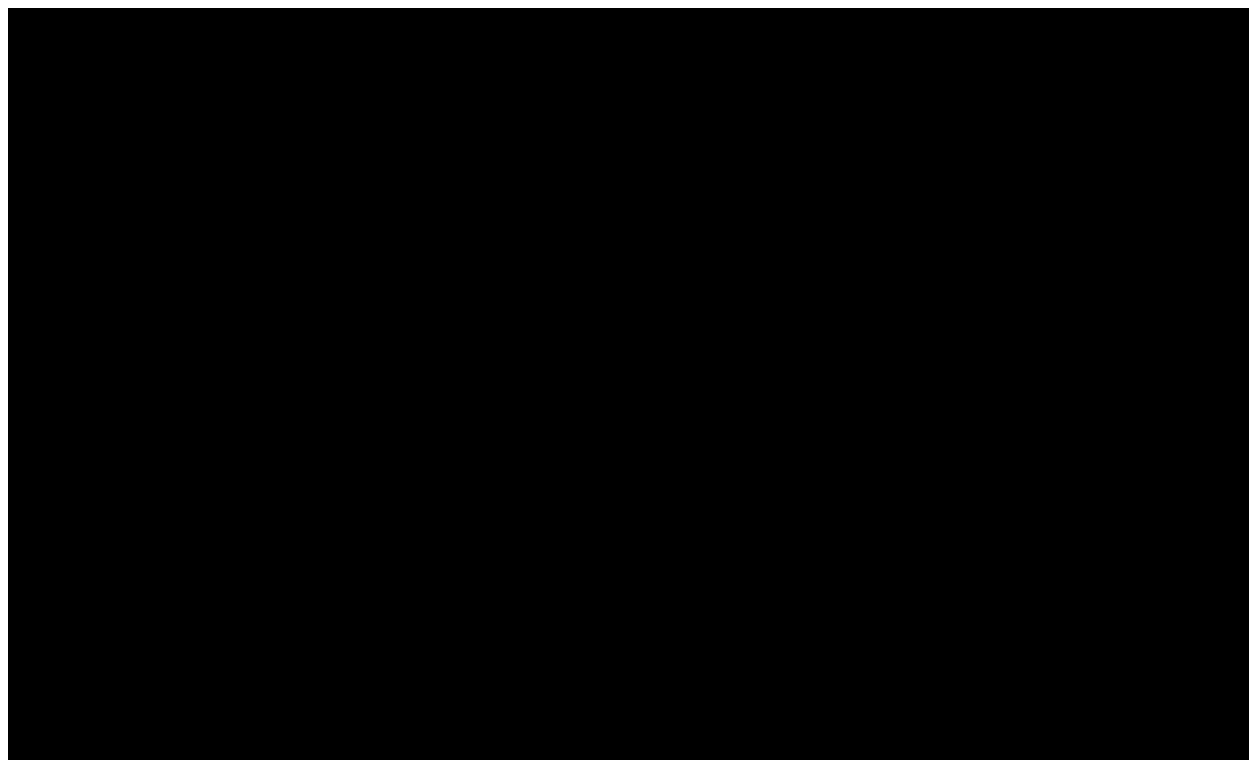












Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas ditunjang dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

2.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Kebijakan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEJUDIA KAN	URUSAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN		UPAYA MENGATAS PERMASALAHAN		TIRU UT EVALUASI DPRD
							1.....	2.....	1.....	2.....	
1	Pendidikan	1. Dinas Pendidikan 2...../...../.....	1.....	2.....	1.....	2.....	1..... 2..... Dst.....
2/...../.....	1.....	2.....	1.....	2.....	1..... 2..... Dst.....

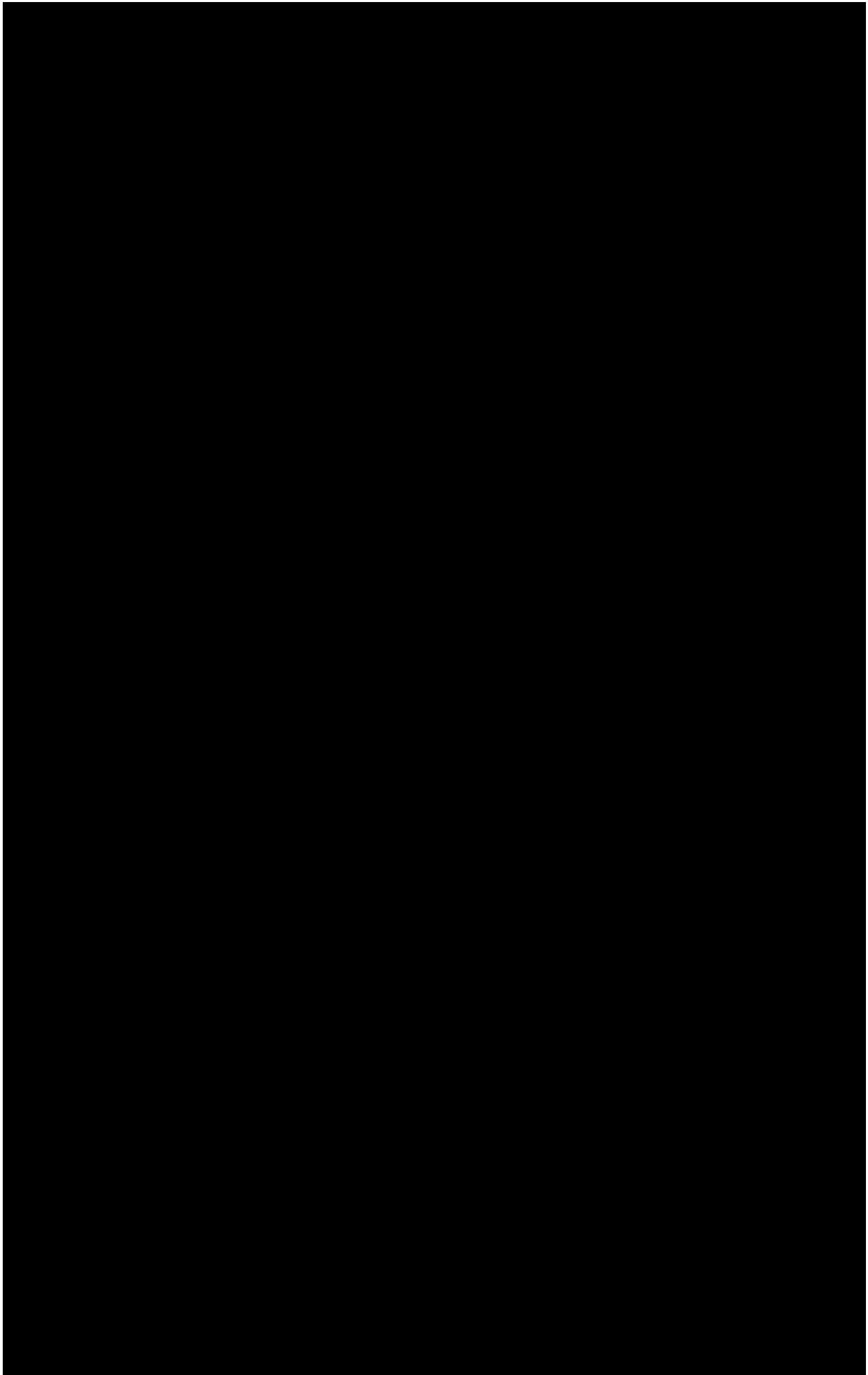
Keterangan:
 Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat outcome yang segera terlihat setelah output dicapai (immediate outcome). Contoh pembangunan jalan, outputnya adalah panjang jalan yg terbangun, successnya adalah peningkatan sosial dari/waktu ekonomi masyarakat. Sedangkan immediate successnya antara lain adalah waktu tempuh saat biaya/mengkon angkut pada ruas jalan yg dibangun tersebut.

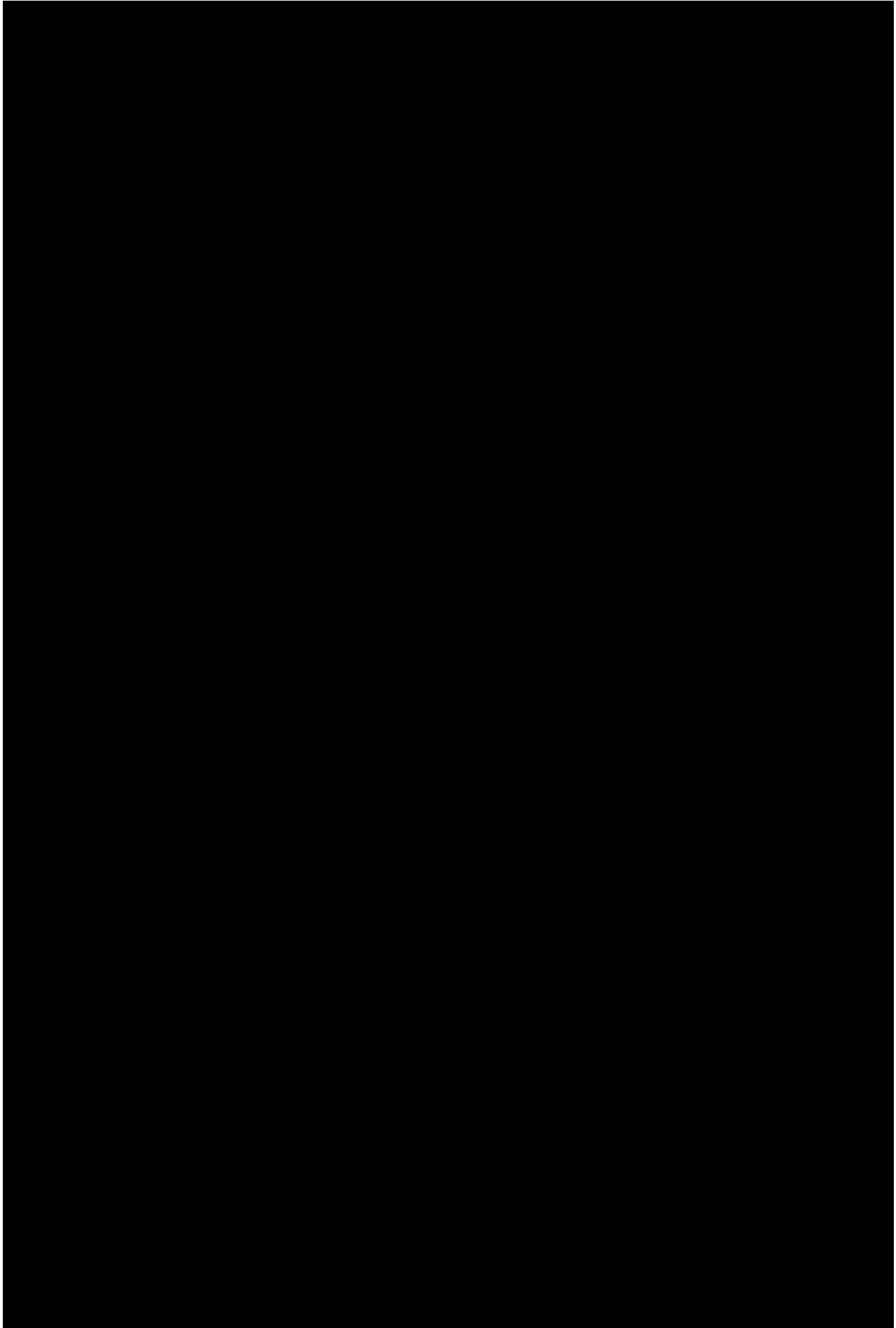
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Kebijakan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEJUDIA KAN	URUSAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASA LAHAN		UPAYA MENGATAS PERMASALAHAN		TIRU UT EVALUASI DPRD
							1.....	2.....	1.....	2.....	
1	Tenaga Kerj.	Dinas Tenaga Kerj./...../.....	1.....	2.....	1.....	2.....	1..... 2..... Dst.....
2/...../.....	1.....	2.....	1.....	2.....	1..... 2..... Dst.....

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAH HAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBELAJARAN	USULAN PROG/IRG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MEREGULASI PERMASALAHAN	TIRJUT REKOMENDASI UPED
1	Kelahiran dari pelaksanaan	1. Dinas Kelahiran dan perkawinan 2.	1. 2. Dst.	1. 2. Dst.	1. 2. Dst.
2	1. 2. Dst.	1. 2. Dst.	1. 2. Dst.





BAB IV
 SISTEMATIKA RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH

RLPPD merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:

1. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Format laporan kinerja makro meliputi:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Per kapita			
6	Ketimpangan Pendapatan			

2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, sosial, ketentraman dan ketertiban)
3. Hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya
4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah
5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan
6. Inovasi Daerah

BAB V
INDIKATOR KINERJA UNTUK EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. EPPD terdiri atas 2 (dua) indikator sebagai berikut:

1. **Evaluasi Kinerja Makro:**

Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro EPPD dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LKPD. Evaluasi Kinerja Makro dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja makro yang sama untuk provinsi, kabupaten dan kota, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Bobot Indikator
1	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2	Angka kemiskinan	20%
3	Angka pengangguran	15%
4	Pertumbuhan ekonomi	10%
5	Pendapatan per kapita	15%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

2. **Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

a. **Urusan**

1) **Urusan Pemerintahan Wajib Berkeadilan Pelayanan Dasar**

a) **Pendidikan (Jalur Umum) : 6%**

No	EKK Output	EKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri bersubsidi 2. Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menamatkan perkuliahan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tingkat partisipasi warga usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 tahun tidak sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas}}{\text{Jumlah anak usia 16 tahun tidak sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	10%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pertolongan dasar pertama didik dari Pemerintah Daerah.			
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pertolongan biaya pendidikan.			
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pertolongan biaya pendidikan.			
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan			
8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas			
9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan			
10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas			
11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
12.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas			
13.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan			
14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
16.	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tugas pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
17.	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tugas pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
18.	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
19.	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
20.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
21.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.	1. Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidik khusus yang menerima penugasan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik pada pendidik khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus 5. Jumlah pendidik pada pendidikan khusus 6. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan	50%

No	BK Output	BK Outcome	Rumus	Bobot
7.	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus			
8.	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
9.	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
10.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			

b) Kesehatan (Bobot Urusan : 6%)

No	BK Output	BK Outcome	Rumus	Bobot
1.	Jumlah RS rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Nasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi ----- x 100 % Jumlah Penduduk provinsi	25%
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasi	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan provinsi yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS provinsi	25%
3.	1. Jumlah dukungan Logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun ----- x 100 % Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		dalam satu tahun yang sama	
4.	Jumlah SDM kesehatan yang terganggu dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			
5.	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tergal di wilayah berpotensi bencana			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan yang terganggu dalam Tim Herak Cepat provinsi 3. Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB luas kabupaten/kota	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	25%

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (Ha)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (a) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ba)	10%
4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m)	10%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengaliran/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi			
6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengaliran/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi			
7.	Lata prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi			

No	IKE Output	IKY Outcome	Rumus	Bobot
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 	<p>Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi</p>	<p>Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dipemasi dan pelibsat (ha) di tahun eksisting</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi}} \times 100 \%$	15%
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dokumen SISPAM lintas kabupaten/kota 2. Tersusun dan dilaksanakannya JAKSTRADA provinsi 3. Jumlah BUKD dan atau LPH provinsi penyelenggara SPAM 4. Jumlah IBA yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan 	<p>Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyediaan air minum melalui JAKSTRADA provinsi kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan penyediaan air minum melalui lintas</p>	<p>Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyediaan air minum melalui lintas kabupaten/kota</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan penyediaan air minum melalui lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.}}$	20%

No	IKE Output	IKY Outcome	Rumus	Bobot
5.	<p>SPAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. 	<p>kabupaten/kota</p>		
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SPALD Regional 2. Total kapasitas SPALD Regional 3. Total volume Limbah yang masuk ke SPALD Regional 4. Jumlah sarana dan prasarana pengkolan limbah domestik 5. Jumlah BUMD/UTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak) 	<p>Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional</p>	<p>Total volume limbah yang masuk dalam SPALD Eksisting Regional</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Total kapasitas pengolahan limbah SPALD Domestik Regional}}$	10%
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang jalan berkecepatan yang ditetapkan kepada daerah dalam 3K jalan kewenangan provinsi 	<p>Rasio kemampuan jalan</p>	<p>Panjang jalan kewenangan provinsi yang masih</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di}}$	15%

No	IKE Output	IKY Outcome	Rumus	Bobot
2.	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi		wilayah provinsi	
3.	Panjang jalan yang dibangun			
4.	Panjang jembatan yg dibangun			
5.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsional)			
6.	Panjang jembatan yang diganti/dibekukan			
7.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi			
8.	Panjang jembatan yang direhabilitasi			
9.	Panjang jalan yang dipelihara			
13.	Panjang jembatan yang dipelihara			

No	IKE Output	IKY Outcome	Rumus	Bobot
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi 	<p>Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli</p>	<p>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli</p> $\frac{\text{-----}}{\text{jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi}} \times 100 \%$	10%

No	IKE Output	IKY Outcome	Rumas	Bobot
6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN			
7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya			
8.	Tersedianya data dan profil CPD sub urusan jasa konstruksi provinsi			
9.	Tersedianya data dan informasi Pelaksanaan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan			

No	IKE Output	IKY Outcome	Rumas	Bobot
	Kerja (LPKK)			
10.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli			
11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi			
12.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, kualifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	keuntungan pengawasannya			
13.	Tersedianya data dan informasi mengenai pelaksanaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
14.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidakefektifan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			

d) Perumahan Rakyat (Bobot Urusan : 33%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya Jumlah rumah yang terdampak bencana alam Jumlah IKP, SK dan Hra korban yang rumahnya terkena bencana alam Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	<p>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <p>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</p>	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana awal</p> <p>7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana</p> <p>8. Jumlah RT, KK dan Desa korban bencana yang terfasilitasi</p> <p>9. Jumlah, luasan dan lokasi percedangan lahan</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.	<p>1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p> <p>3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM</p>	<p>Penerima warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni</p>	<p>Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</p> $\frac{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}}{\text{-----}} \times 100\%$	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 2. Jumlah unit perumahan kualitas RPLH 3. Jumlah lokasi [lok] penguasaan infrastruktur kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kurang 10 - 15 Ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kurang 10 - 15 Ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan kurang 10 - 15 Ha}} \times 100 \%$	25%
4.	1. Jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU 2. Jumlah pengembang yang bersertifikasi	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{\text{Jumlah satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU}}{\text{Jumlah satuan perumahan}} \times 100 \%$	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	3. Jumlah pengembang yang terregistrasi 4. Jumlah pengembang yang mendapat penyediaan atau pelatihan			

g) Keterampilan, Ketahanan dan Daya Tahan, Peningkatan Masyarakat (Balok Unsur : 68)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah pelanggan dan pengaduan transibum dalam Kob/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satisfians yang terbentuk dan dilaunchkan 3. Jumlah sesuai prosedur minimal yang dipenuhi 4. Jumlah Perda dan Perkada yang dibagikan	Persentase ganggaur Transibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggan yang masuk}} \times 100 \%$	25%

No	SK Output	SK Outcome	Rumus	Bobot
	5. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPMB 6. Jumlah SKH dalam pelaksanaan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum			
2		Persentase Perda dan Perkada yang diregulkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang diregulkan $\times 100\%$ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	25%
3	1. Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Persentase penyelesaian dokumen ketencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legat	Kemajuan pelerjaan dokumen ketencanaan yang disusun $\times 100\%$ Jumlah dokumen ketencanaan yang akan disusun	20%

No	SK Output	SK Outcome	Rumus	Bobot
	2. Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi 3. Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kemitjensi provinsi			
4	1. Pelaksanaan pebilan pengujian dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan penemuan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	Persentase penugasan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penugasan pra bencana $\times 100\%$ Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dokumen levi cepat bencana provinsi 2. Respon cepat penanganan dan rat bencana provinsi 3. Pemetaan, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi 4. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi 	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	<p>Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana ----- x 100 %</p> <p>Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana</p>	

j) Sosial (Bobot Urusan : 5%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permukiman di dalam panti sesuai standar gld 2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket asuhang di dalam panti 3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) 4. Jumlah slot kamar yang disediakan di dalam panti 5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti 	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- x 100 %</p> <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar di dalam provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti</p>	20%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
6.	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam partai			
7.	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam partai			
8.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam partai			
9.	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dilaksanakan dalam partai			
10.	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam partai			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
11.	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam partai			
12.	Jumlah penyandang disabilitas terantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam partai			
13.	Jumlah penyandang disabilitas terantar didalam partai yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
14.	Jumlah penyandang disabilitas terantar didalam partai yang mendapatkan pelayanan pemenuhan keluarga			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
15.	Jumlah penyandang disabilitas tertantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi keluarga			
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket pemukiman di dalam panti sesuai standar gizi 2. Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket asndang di dalam panti 3. Jumlah asrens yang tersedia dan mudah diakses (panti) 4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti 5. Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan yang 	<p>Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di dalam panti</p>	<p>Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhannya ----- x 100 %</p> <p>Populasi Anak Terlantardi daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti</p>	20%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	disediakan di dalam panti			
6.	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti			
7.	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti			
8.	Jumlah tenaga kesehatan (okter, psikiater, pekas medis) yang disediakan di dalam panti			
9.	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesehatan sosial yang disediakan di dalam panti			
10.	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	11. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti			
	12. Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan serta lahir di dalam panti			
	13. Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
	14. Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan pemukiman keluarga			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	15. Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga			
3.	<p>1. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket pemabaran di dalam panti sesuai standar gizi</p> <p>2. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket asongan di dalam panti</p> <p>3. Jumlah screens yang tersedia dan mudah diakses</p> <p>4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti</p> <p>5. Jumlah pebekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti</p>	<p>Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</p>	<p>Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$	20%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
6.	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam parti			
7.	Jumlah paket bimbingan Iktik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam parti			
8.	Jumlah tenaga kesihatan (doktor, psikiker, perkas medis) yang disediakan di dalam parti			
9.	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam parti			
10.	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam parti			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
11.	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Karcis Induk Kependudukan di dalam parti			
12.	Jumlah Lanjut Usia Terantar didalam parti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesihatan dasar			
13.	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam parti yang mendapatkan pelayanan penuliharaan keluarga			
14.	Jumlah Lanjut Usia Terantar didalam parti yang mendapatkan pelayanan reintegrasi keluarga			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4	<p>15. Jumlah Lanjut Usia Terantar yang mendapatkan layanan pemeliharaan</p> <p>1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permukiman di dalam parti sesuai standar gizi</p> <p>2. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam parti</p> <p>3. Jumlah senas yang tersedia dan mudah diakses</p> <p>4. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam parti</p> <p>5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam parti</p>	<p>Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam parti</p>	<p>Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam parti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- x 100 %</p> <p>Populasi Gelandangan dan Pengemis Terantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam parti</p>	20%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam parti</p> <p>7. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam parti</p> <p>8. Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikoter, perawat) yang disediakan di dalam parti</p> <p>9. Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam parti</p> <p>10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam parti</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	11. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat timbangan keterampilan dasar			
	12. Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau SIM d. dalam panti			
	13. Jumlah Gelandangan dan Pengemis difasilitasi panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
	14. Jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yg mendapatkan pelayanan penulisan keluarga			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	15. Jumlah Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang mendapatkan pelayanan reintegrasi keluarga			
5.	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4. Jumlah paket pertolongan khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan dukungan psikososial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	20%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
6.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesehatan sosial dan/atau layanan sosial yang tersedia			

Uraian Fasilitasi dan Wajih Tidak Berjalan Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja (Folat Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Delapan perencanaan tenaga kerja provinsi. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}} \times 100\%$	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4.	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RPK perusahaan.			
1.	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNP / okupasi. 2. Persentase instruktur ber-sertifika kompetensi. 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan. 4. Persentase anggotanya yang dilatih. 5. Persentase lulusan ber-sertifikat kompetensi. 6. Persentase penyerapan lulusan. 7. Persentase LPK yang terakreditasi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja tersedia}} \times 100\%$	20%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	8. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan			
	9. Jumlah pebelanja Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)			
2.	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	20%
	2. Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas			
	3. Nilai tingkat produktivitas total			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	20%
	2. Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	IPP/PPK, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.		
	3. Rekomendasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan per's tahun n			
	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah			
	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.			
	6. Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
7.	Persentase jumlah perusahaan yang beresolusi			
8.	Jumlah mangok kerja			
9.	Jumlah penutupan perusahaan			
10.	Jumlah perselisihan kepentingan			
11.	Jumlah perselisihan hak			
12.	Jumlah perselisihan antara SP/SPB di perusahaan			
13.	Jumlah Perselisihan PHK			
14.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			
15.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			
16.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
17.	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.			
18.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
1.	1. Jumlah rekomendasi penempatan tenaga kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi 2. Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPKAL) (SPKAL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang	Pemerintah Tenaga kerja yang ditempatkan (plalsu dan lain ungat) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 partu daerah provinsi.	Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencari yang terdaftar	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>diterbitkan oleh dinas provinsi</p> <p>3. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi</p> <p>4. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi</p> <p>5. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi</p> <p>6. Jumlah pejabat fungsional profesional kerja</p> <p>7. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>8. Jumlah Lembaga Penyelenggara Pekerja Rumah Tangga (LPHRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>9. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Basis Kerja (IBK) online/sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISMAKER)</p> <p>10. Jumlah Pekerja Migrant Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya</p> <p>11. Jumlah Ijin Kantor Cabang Penempatan Pekerja Migrant Indonesia (PGMI)/Perusahaan</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
5	<p>12. Jumlah Pas pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga kerja Indonesia (TKI).</p> <p>1. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berkerja.</p> <p>2. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKKWI).</p> <p>3. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Tanggapan.</p> <p>4. Jumlah Perusahaan yang</p>	<p>Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan</p>	<p>$\frac{\Sigma \text{ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perancangan ketenagakerjaan pada tahun } n}{\Sigma \text{ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun } n} \times 100\%$</p>	20%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	<p>menerapkan Norma Asuransi Sosial.</p> <p>5. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.</p> <p>6. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>7. Jumlah Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.</p> <p>8. Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.</p>			

b) Membenarkan Perempusan dan Perlindungan Anak (Bentuk Urusan : 3%)

No	EKK Output	EKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG</p> <p>2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi</p>	Persentase ARG pada belanja anggaran APBD	<p>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di provinsi</p>	35%
2.	<p>1. Jumlah media massa cetak, elektronik yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Linus PPPM) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak</p> <p>2. Jumlah keluarga binaan anak yang telah memenuhi standar pelayanan minimal</p>	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	<p>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) kab/kota kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)</p>	35%

No	EKK Output	EKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani</p> <p>4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan</p> <p>5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/besitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (A-BD provinsi)</p>			
3.	<p>1. Jumlah ketajaksanaan/penggunaan pencegahan kekerasan terhadap perempusan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi</p> <p>2. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak</p>	Rasio kekerasan terhadap perempusan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempusan)	<p>Jumlah perempusan yang mengalami kekerasan</p> <p>----- x 100.000</p> <p>Jumlah penduduk perempusan</p>	35%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	perempuan yang telah terstandarisasi			
3	Persentase latihan keterampilan perempuan yang terlayani			
4	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan			
5	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)			

c) Pangan (Bobot Jurusan : 38%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dari pangan lainnya 3. Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi 4. Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal 5. Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi 	Persentase cadangan pangan	<p>Jumlah cadangan pangan provinsi ----- x 100%</p> <p>Jumlah kebutuhan pangan provinsi</p>	1,0%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
6.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi			
7.	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan ghd provinsi			
8.	Tertanganinya kejadian bencana pangan			
9.	Terselenggaranya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan			
10.	Teregistrasi dan tersertifikasi produk sayur di pasar modern			

d) Pertanian (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase Surat keputusan pemberian tanah lokasi 2. Jumlah masalah ganti kerugian dan sengketa tanah untuk pembangunan yang terselesaikan 3. Hk tan. Lokasi yang diterbitkan oleh pemerintah 4. Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggaran	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai lokasi dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% seluruh luas tanah yang diterbitkan izin lokasi	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu:	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu ----- x 100%	30%
3.		Tersedianya Lokasi Perumahan di kabupaten/kota	Luas pemanfaatan lahan luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya di atas izin lokasi lahan kota/ kota ----- x 100%	30%

e) Lingkungan Hidup (Bobot Jurusan : 38%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi		30%
2.	1. Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi. 2. Hasil kegiatan pengawas LH di daerah (PPLH) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi.	Ketersediaan pengawas jawah usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pengawas jawah usaha dan/atau kegiatan yang mennggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi ----- x 100%	30%

No	IKK Output	IKK Outcome	Skor	Bobot
3.	Penetapan baik MHA terkait dengan PPH yang berada di desa atau lebih daerah kabupaten/dalam 1 provinsi			
4.	Terfasiliasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPH			
5.	Terfasiliasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPH			
6.	Pemenuhan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau lain PPH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi			

No	IKK Output	IKK Outcome	Skor	Bobot
	dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak luas kabupaten/kota			

g) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Badan Usaha - 25%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Skor	Bobot
1.	Facilitasi pelayanan Administrasi	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ 2 kali	50%
		Pemanfaatan data kependudukan	CPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perijinan kerjasama $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ Kabupaten/Kota	50%

g) **Pembinaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)**

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Persentase pengantasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ -Jumlah desa tertinggal (per awal tahun a)	50%
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			
2.	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan dibertarakan	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ -Jumlah desa berkembang (per awal tahun a)	50%
	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			

h) **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bobot Urusan : 2%)**

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Persepsi 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	TKR (Angka Kelahiran Total)		33%

No	BKK Output	BKK Outcome	Rumus	Bobot
	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBPK (advokasi dan KIE); 5. Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan yang berpersa sama sifat dalam pengelolaan program KBPK)			
2.	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Jumlah ibu Desa di Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KBPK yang efektif	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	33%

No	BKK Output	BKK Outcome	Rumus	Bobot
	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan			
	1. Persentase kesetaraan SB di Kabupaten dan Kota dengan kesetaraan rendah 2. Persentase kesetaraan KB keluarga Peserta Bantuan Lunas (PBL)	Persentase kebutuhan ter-EB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PLS yang ingin ter-EB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	33%

l) Perhitungan (Bobot Urutan : 3%)

No	EKK Output	EKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Persentase terselesainya finalisasi penyelenggaraan terminal perampang angkutan tipe B</p> <p>2. Penerapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi</p>	<p>Rasio konektivitas Provinsi</p>	<p>Rasio konektivitas Provinsi = (K1 x bobot angkutan jalan) + (K2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> o K1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut o K2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) 	30%

No	EKK Output	EKK Outcome	Rumus	Bobot
			<p>Keterangan:</p> <p>K1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam aturan waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam aturan waktu tertentu <p>K2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas 	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bebat
			<p>adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersial untuk mengangkut satu wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bebat Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Perseberangan :</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bebat angkutan SDP = 70, bebat angkutan jalan = 30)</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan</p>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bebat
			<p>penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bebat angkutan SDP 70, bebat angkutan jalan = 30)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bebat angkutan SDP = 30 [bebat angkutan jalan = 70])</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bebat angkutan SDP = 0, bebat angkutan jalan = 100)</p> <p>Bebat Trepak atau Lintas :</p> <p>a. Bebat Trepak atau Lintas dengan frekuensi tinggi (3-4x dalam seminggu, bebat = 1</p>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.	1. Persentase pelaksanaan pembangunan dan aksesibilitas infrastruktur jalan provinsi	V/C Rata di Jalan Provinsi	b. Bobot Trayek atau Lintas dengan kelancaran sedang (3-4 dalam seminggu, bobot = 0,8) c. Bobot Trayek atau Lintas dengan kelancaran rendah (<3 dalam seminggu, Bobot = 0,5)	30%

j) Komunikasi dan Informatika (Bobot Urutan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan yang disediakan oleh Dinas	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	35%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.	Kontinú 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah)			
3.	1. Persentase layanan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring	Persentase Layanan Publik yang disediakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang disediakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	35%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	<p>dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara</p> <p>2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p> <p>3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	<p>4. Persentase layanan SP3E (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang terentah dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>5. Persentase layanan SP3E (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>6. Persentase sistem elektronik yang tersedia sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>sistem penghubung layanan pemerintah</p> <p>8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</p> <p>9. Persentase perangkat daerah yang menampung data di pusat data pemerintah</p> <p>10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui database sesuai salitas jenis data (sesuai restra, kominfo)</p> <p>11. Tersentosa data yang dapat berbagi pakai</p> <p>12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</p>			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>13. Tersentosa ASN pengelola TK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas kominfo</p> <p>14. Tersedianya perutusan daerah atau perutusan kepala daerah terkait implementasi e-government</p>			
3.	<p>1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi</p> <p>2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi</p>	<p>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebutan informasi publik, mengadopsi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi</p>	<p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi</p> $\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	30%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	(STRAKOM)			
	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan			

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Bobot Urusan = 2%)

	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah kesugestaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2. Persentase fasilitasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAI, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	50%

	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah kesugestaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang			

IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
<p>dilabel kesahatan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan pertoporan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1</p>			

IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
<p>(satu) daerah provinsi</p> <p>7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pertoporan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>8. Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi</p>			

	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemersaman untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah			

	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemudahan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
2.	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil 2. Persentase jumlah usaha kecil yang terdapat ke dalam sistem online data system (ODS) 3. Persentase jumlah usaha kecil yang bermula	Meningkatkan Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah usaha kecil keseluruhan	50%

	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
4.	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha			
5.	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran			
6.	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan			
7.	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan keterampilan dan usaha			

l) Penanaman Modal (Beban Utama : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/inentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/inentif penanaman modal 3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/inentif penanaman modal 4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 5. Kegiatan pameran penanaman modal 6. Kegiatan perceritisan misi penanaman modal 	Persentase peningkatan investasi di provinsi	$\left(\frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1} \right) \text{ di provinsi} \times 100\%$	100%

No	BKK Output	BKK Outcome	Rumus	Beban
7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal			
8.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal			
9.	Laporan realisasi penanaman modal			
10.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota			
11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN			
12.	Yersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi			

m) Kepemudaan dan Olahraga (Beban Urusan : 2%)

No	BKK Output	BKK Outcome	Rumus	Beban
1.	1. Jumlah pemuda yang mencapai pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mencapai bantuan kewirausahaan 3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kode pengembangan kewirausahaan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	33%
2.	1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi ----- x 100%	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	
8.	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 2. Jumlah atlet yang dibina pada SKO, PPLP dan PPM 3. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah 4. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendirian kepramukaan 5. Jumlah organisasi kepramukaan (kawada) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	385%

n) Statistik (Sektor Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompikasi statistik sektoral yang dilakukan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	50%
2.	1. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi DPS 5. Jumlah kompikasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr DPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral 7. Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% jumlah OPD	50%

d) Persandian (Bobot Urutan : 2%)

No	EKK Output	EKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan</p> <p>2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</p> <p>3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan</p>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<p>Jumlah nilai per area keamanan informasi</p> <p>..... x 100%</p> <p>Jumlah area penilaian</p>	100%

No	EKK Output	EKK Outcome	Rumus	Bobot
4.	<p>resiko kategori rendah</p> <p>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemera (PLKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi</p>			

e) Kebudayaan (Bobot Urutan : 2%)

No	EKK Output	EKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah obyek pemertuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengumuman pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)</p> <p>2. Jumlah obyek pemertuan kebudayaan yang dikembangkan</p>	Terlestarkannya Cagar Budaya	<p>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</p> <p>..... x 100%</p> <p>Jumlah cagar budaya yang ditetapkan</p>	100%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ebat
	(penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)			
3.	Jumlah obyek pematian kebudayaan yang dimanfaatkan (jumlah/anggotanya karakter bangsa, melindungi ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)			
4.	Jumlah SDM, lembaga dan prasarana yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)			
5.	Registri cagar budaya (pencatatan, pengkajian, penetapan, pemertanian,			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ebat
	peningkatan, penghapusan)			
6.	Pertindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonisasi, pemeliharaan dan pemugaran)			
7.	Layanan perijinan memabaca cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data			
8.	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, restorasi, adaptasi)			
9.	Pemertanian cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ebat
10.	Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan koleksi museum			
11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum, peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			
12.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemeliharaan koleksi museum			
13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ebat
14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi			
15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya			
16.	Pemetaan situs cagar budaya dan permuseuman			
17.	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman			
18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman			
19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat			

g) Perpustakaan (Isobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> Rasio ketercapaian koleksi perpustakaan dengan penduduk Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Rasio ketercapaian tenaga perpustakaan dengan penduduk Pencapaian perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat Jumlah IKK Usaha yang terlampir Jumlah judul yang 	<p>Milai tingkat kegemaran membaca masyarakat</p>		50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.	<ol style="list-style-type: none"> urutan dalam katalog induk Daerah Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah Jumlah terbitan yang terlampir dalam bibliograf Daerah Jumlah askeah kuno yang diinventarisasi/diambil media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya Jumlah askeah kuno yang diambil aksara dan diilil bahasa Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang terlampir dan/sesu terditer yang ada di wilayahnya (item) 	<p>Indeks Pembangunan Indeks Pembangunan Literasi Jember Masyarakat Masyarakat</p>		50%

r) Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)

No	IRK Output	IRK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SKN melalui JEN 	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 10 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (i + l + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip i = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip l = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SKN melalui JEN	50%
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Penyelamatan arsip 	Tingkat keberagaman dan ketahanan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berkelembaga dan	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T= tingkat keberagaman dan ketahanan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan	50%

No	IRK Output	IRK Outcome	Rumus	Bobot
4.	<ol style="list-style-type: none"> peningkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi Aumentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK Pencarian arsip statis yang pengelolannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup 	bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	pemenuhan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dan bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan augmentasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK l = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	yang disusun di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NRPx		yang bersifat tertutup dengan NRPx	

Urusan Perikanan

a) Kelautan Perikanan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (wop) 2. Jumlah bta usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 33 GT 3. Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional 	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah bta pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-33 GT 5. Jumlah kapal yang terdaftar 6. Jumlah bta usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan 			
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundanguan yang berlaku 2. Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau- 	Persentase Kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundanguan yang berlaku	$\frac{\sum_{i=1}^n (S_i \times x_i)}{n}$ <p>Keterangan: x= Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
	<p> pulau kecil yang dikelola</p> <p>3. Jumlah unit kapal perikanan (10 SDGP) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap</p>		<p>e: jumlah pelaku usaha KP yang patuh</p> <p>f: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa</p> <p>g: jenis komponen pelaku usaha KP</p> <p>n: jumlah komponen pelaku usaha KP</p>	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
	<p>terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang air di bawah 12 mil laut (dulu minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>7. Jumlah FORMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDAP</p> <p>8. Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan</p>			

b) Pariwisata (Bobot Jurusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kabupaten	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	25%
	2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			
2.	3. Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Persentase peningkatan pelaksanaan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	25%
	4. Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata			
3.	5. Jumlah kamar dalam usaha akomodasi	Tingkat Tawaran akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	25%
	6. Jumlah moda dalam usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi			
4.	7. rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	25%
	8. rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat provinsi			
	9. rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat kabupaten			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
8.	10. Jumlah wisatawan mancanegara per kabupaten	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	25%
	9. Jumlah pelaksanaan wisatawan nusantara			
10.	11. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	25%
	12. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi			
11.	13. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	25%
	14. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	14. Persentase SDM peserta pembekalan dasar separtawisataan			
	15. Jumlah lokasi yang mengerjakan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kegiatan usaha masyarakat			

c) Pertanian (Bobot Urusan : 354)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun $\frac{\text{produksi}}{\text{luas panen}} \times 100\%$	30%
	2. Jumlah pemberian sertifikasi dan pengawasan buah tanaman hortikultura			
2.	3. Dokumen pengawasan buah yang beredar	Persentase Pemurnian kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t-1) - jumlah kejadian/kasus	30%
	4. Sarana pertanian yang digunakan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
5.	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian		penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) $\frac{\text{penyakit}}{\text{jumlah kejadian/kasus pengalir hewan menular}} \times 100\%$ jumlah kejadian/kasus pengalir hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	
	6. Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana			
	7. Pemberitaan izin usaha pertanian			
	8. Persentase sarana pertanian yang digunakan			
	9. Persentase hasil dari penanggulangan bencana			
	10. Persentase jumlah usulan usaha pertanian			

d) Kehutanan (Bobot Urusan : 2%)

No	DIK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Dokumen penataan hutan wilayah KPH	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal x 100%	33%
	2. Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek		Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	
2.	3. Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Persentase kerusakan hutan patahan (dekomposisi)	Jumlah hutan yang rusak x 100%	33%
	4. Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi		Jumlah hutan kebakaran	
3.	5. Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengarusutan hutan ilegal logging dan perambahan)	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) x 100%	33%
	6. Jumlah hasil KTA usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas 5000 m ³ per tahun yang aktif		Luas lahan kritis di provinsi (ha)	
	7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan			
8.	Pemberdayaan masyarakat di daerah perhutanan			
9.	Pemulihan ekosistem pada lahan			
10.	Menurunkan gangguan kawasan hutan			
11.	..Jumlah ketersediaan produk kehutanan			
12.	Jumlah rencana dan program kegiatan pemuliharaan			
13.	Jumlah KTH yang diberikan pendanaan dan pelatihan			
14.	..Resilensi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan			

<p>5.000 m³ per tahun yang aktif</p> <p>7. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan</p> <p>8. Pemberdayaan masyarakat di daerah perhutanan</p> <p>9. Pemulihan ekosistem pada lahan</p> <p>10. Menurunkan gangguan kawasan hutan</p> <p>11. ..Jumlah ketersediaan produk kehutanan</p> <p>12. Jumlah rencana dan program kegiatan pemuliharaan</p> <p>13. Jumlah KTH yang diberikan pendanaan dan pelatihan</p> <p>14. ..Resilensi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan</p>	
--	--

<p>15. terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi</p> <p>16. Terbenutnya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor</p>			
--	--	--	--

e) Energi Sumber Daya Mineral (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Perda/Perqub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Mengganggu Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda ----- x 100%	50%
2.	2. Perda/Perqub terkait izin penggalian, pemakaian dan lain pengusahaan air tanah	Persentase Desa Yang Tersedia Listrik	Jumlah desa yang tersedia listrik ----- x 100%	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4.	4. Perda/Perqub terkait izin penggalian, pemakaian dan lain pengusahaan air tanah dalam area provinsi		Jumlah desa	
5.	5. Perda/Perqub terkait penerapan nilai perolehan air tanah			
6.	6. Perda/Perqub terkait dengan tata ruang wilayah KOWPLA dalam daerah provinsi			
7.	7. Perda/Perqub terkait dengan pertanahan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi			
8.	8. Perda/Perqub terkait UUP			
9.	9. Perda/Perqub terkait penerapan harga patokan mineral bukan logam dan			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Robot
	<p>aturan sesuai UU 29/2009</p> <p>10. Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan</p> <p>11. Jumlah penerbitan SKT pada bulan dalam 1 tahun</p> <p>12. SK izin usaha naga bahan bakar nabati</p> <p>13. Perda/Perqub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara, penerbitan, pembinaan dan pengawasan)</p> <p>14. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi</p> <p>15. Perda/Perqub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh</p>			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Robot
	<p>pemerintah daerah provinsi</p> <p>16. Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, kejadian kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi</p> <p>17. Penerbitan izin usaha jasa penyalang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas saharanya dimiliki oleh pemegang modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeliharaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah</p>			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
19.	Pelaksanaan pembangunan listrik pedesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu			

Q. Perdagangan (Babak Urutan : 39)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang 2. Fasilitasi pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk 3. Fasilitasi pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor 	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	$\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan} - \text{nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}} \times 100\%$	14%

4.	Fasilitasi pelaku usaha yang menjadi eksportir baru			
5.	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan citra produk ekspor			
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengaduan konsumen 2. Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi 	Persentase pengaduan konsumen	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditanggapi dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang diterimakan tahun berjalan}} \times 100\%$	14%
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sumber potensial yang dipantau 	Persentase komedi potensial yang sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{.....}} \times 100\%$	14%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.	Indeks Kinerja DPSMD	berlaku	Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun	
4.	<ol style="list-style-type: none"> Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan Persentase rekomendasi SIUP MB lagi Distributor yang diterbitkan Persentase SIUP Eskan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan Persentase penutupan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat Persentase penutupan SIK yang tepat waktu 	tertib secara	<p>Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TDB</p> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ <p>Jumlah pelaku usaha MB TDB</p>	14%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
5.	1. Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyairan dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di produksi	Persentase kriteria realisasi pupuk	<p>Realisasi</p> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ <p>RDKK</p>	14%
6.	1. Jumlah barang beredar yang diawasi	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perancang undangan	<p>Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ <p>Jumlah barang beredar yang diawasi</p>	14%
7.	<ol style="list-style-type: none"> Keoperasian pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya barang pada distribusi Tidak ditetapkannya badan usaha pengelola pusat 	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KVpt = \frac{Su}{r} \times 100\%$ <p>KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok suatu waktu</p> <p>Su = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan</p>	14%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani 2. Persentase koefisien variasi harga antar waktu 3. Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga kemendag		Januari s.d Desember $P =$ rata-rata harga provinsi kurang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember	

g) Perindustrian (Bobot Linier : 38%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Perubahan jumlah industri besar di provinsi	$\frac{\text{Jumlah Industri besar tahun } n - \text{Jumlah Industri besar tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Industri besar tahun } (n-1)} \times 100\%$	10%
2.	Persentase terselenggaranya dokumen RPP sampai dengan ditetapkan menjadi perda	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan Indikator pelaksanaan industri dalam RPPN yang ditetapkan dalam RPP		17%
3.	1. Persentase jumlah unit usaha industri (UU) besar yang diterbitkan	Persentase jumlah hasil pendaftaran dan pengawasan dengan jumlah Unit Usaha Industri (UU) Besar yang	$\frac{\text{Jumlah UU yang dipenda dan diawasi dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah UU yang dikeluarkan}} \times 100\%$	17%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
4.	2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPU) bagi industri besar yang diterbitkan 3. Persentase jumlah penyetoran izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% jumlah izin yang dikeluarkan	17%
5.		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	17%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
6.	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SJI. Nss termasuk total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi tenaga kerja/energy - Informasi tenaga kerja - Informasi investasi 	17%

h) Transmigrasi (Bobot Urusan : 15%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya 2. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya			

Fungsi Pemangku Urusan Pemerintahan

g) Perencanaan dan Keuangan (Bobot Urusan : 30%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Rasio Belanja Pegawai Di Luar Gaji dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar gaji dan tenaga kesehatan x 100 % Jumlah APBD	16,7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.		Rasio PAD	Jumlah PAD X 100% Jumlah PADH non migas	16,7%
3.		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures X 100% jumlah belanja APBD	16,7%
4.		Optimasi Laporan Keuangan	Optimasi Laporan Keuangan	16,7%
5.		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dicatatkan oleh BPKP	16,7%
6.		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang	16,7%

No.	IKK Output	IKK Durasi	Rumus	Bobot
			diciptakan oleh BPKP	

i) Pengadaan (Bobot Uraian : 10%)

No	IKK Output	IKK Durasi	Rumus	Bobot
1.		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu penitengunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n	33%
2.		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif X 100% jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	33%

No	IKK Output	IKK Durasi	Rumus	Bobot
3.		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan X 100% total belanja langsung	33%

j) Kepegawaian (Bobot Uraian : 20%)

No	IKK Output	IKK Durasi	Rumus	Bobot
1.		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas X 100% jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	33%
2.		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (guru dan tenaga kesehatan) X 100% seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk	33%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.		Rasio Jumlah Guru Fungsional bersertifikat Kompetensi (P4) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35%

k) Manajemen Keuangan (Bobot Urusan : 20%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu	25%
2.		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD tertutup anggaran PAD dalam APBD	Nilai sisihan dari Total PAD dalam realisasi ----- X 100% dikurangi total PAD dalam APBD dikurangi satu	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.		Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	25%
4.		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SIPA ----- X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya	25%

b) Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot Urusan : 20%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Dengan anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda $\text{-----} \times 100\%$ Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	50%
2.		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda $\text{-----} \times 100\%$ total jumlah dokumen yang telah diinput	50%

kecamatan/kota

Urusan Pemerintahan Wajib Berkeadilan Pelayanan Dasar

c) Pendidikan (Bobot Urusan : 5%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah Sman Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartispasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah masuk atau sedang belajar di satuan PAUD $\text{-----} \times 100\%$ Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan	5%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
	yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			
7.	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepada satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah yang			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
	berwung			
2.	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima pendengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	25%
3.	3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pendengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pendengkapan bisa pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	25%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan			
6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar			
7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			
8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar			
9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			
10.	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			
11.	jumlah kebutuhan minimal			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			
12.	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			
13.	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			
14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
15.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tugas resmi pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tugas resmi pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
19.	Jumlah tenaga perantara lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
19.	Jumlah tenaga perantara lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.			
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terkreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pendengaran dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 	<p>Angka: partisipasi warga usia 7-8 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p>	<p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah lanjut atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang yang bersangkutan</p>	25%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
5.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			
6.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			
7.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1			

b) Kesehatan (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	Jumlah RS rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (S-A) sesuai standar	Kasus daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota}} \times 100\%$	7%
2.	Jumlah RS diluar dan dipersiapkan atau ditingkatkan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota}} \times 100\%$	7%
3.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100\%$	7%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten/zota	7%
5.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/zota	7%
6.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar x 100 % Jumlah balita di kabupaten/zota	7%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
7.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	7%
8.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	7%
9.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	7%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
10.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	7%
11.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	7%
12.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ baru yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	7%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
13.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	7%
14.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar x 100 % Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	7%

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Dobot
1.	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Basis luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) $\frac{\text{-----}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100 \%$	10%
2.	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Basis luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota (m) $\frac{\text{-----}}{\text{Luas kawasan permukiman}}$	10%

5.	5. Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Peraliran/daur pengaliran air di WS kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana ekuitas tata pengaturan air dan tata pengaliran/daur alir pengaliran sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Tata prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		
9.	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tertier kondisi baik	Basis luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilewati oleh jaringan irigasi	Luas Daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha) diperoleh danelihara (ha) di tahun elektrisring $\frac{\text{-----}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota}}$	10%

	1	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		
	2	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		
	3	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		
	4	Kinerja penyedia pelayanan SPALU B akses dasar		
	5	Kinerja penyedia pelayanan SPALU B akses aman		
	6	Kinerja penyedia pelayanan SPALU akses aman		
	10	Kinerja penyedia unit pengolahan air tawar		
	11	Kinerja penyedia layanan pengangkutan lumpur tinja		
	12	Kinerja penyedia pemeliharaan pengolahan lumpur tinja		
	13	Kinerja penyedia sambungan rumah yang tersambung ke IPALU		
	14	Kinerja penyedia jasa pengolahan lumpur tinja		
6.	1.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah dua keluarga) yang laik huni	Posisi konstansi IMB	Jumlah IMB yang berlaku
	2.	Jumlah IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran		
			Jumlah pemenuhan IMB yang sesuai peruntukannya	10%
			----- x 100 %	

	<p>4. Kemudahan Perumahan (sewa) rumah Berukusua/Gedung (A-B/klak)</p> <p>4. Jumlah Rumah Berukusua Gedung/Wakilota sedang (A-B/klak) Kabupaten/Gedung (A-B/klak)</p> <p>5. Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi oleh Bupati/Wakilota untuk di tingkat dan distrik</p> <p>6. Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi oleh Bupati/Wakilota untuk kepentingan strategis daerah provinsi</p> <p>7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten</p>	
<p>7.</p>	<p>8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang direhabilitasi</p> <p>1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam sk. dalam perencanaan kab/kota.</p> <p>2. Panjang jalan yang dibangun</p> <p>3. Panjang jembatan yang dibangun.</p> <p>4. Panjang jalan yang rusak berat dan ditangani</p> <p>5. Panjang jembatan yang dibangun/direhabilitasi</p> <p>6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi</p> <p>7. Panjang jembatan yang direhabilitasi</p>	<p>Jumlah panjang jalan dalam kondisi rusak y m/m</p> <p>Jumlah kota panjang jalan kabupaten/kota</p>

<p>E.</p>	<p>8. Panjang jalur yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara 1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlibat di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terampil yang tersertifikasi oleh di wilayah kabupaten/kota 4. Tersedianya Sistem Informasi Pemasaran Jasa Konstruksi Kabupaten/kota yang aktif dengan cara terintegrasi</p>	<p>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terampil di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis x 10000 Jumlah tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota yang memiliki sertifikat kompetensi</p>	<p>10%</p>
-----------	--	--	------------

	<p>a. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten</p> <p>b. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD</p> <p>c. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya</p>	
--	---	--

<p>8. Tersedianya data dan informasi terkait pelaksanaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termasuk di zona Ierkala</p> <p>9. Tersedianya data dan profil UPD sub-musan jasa konstruksi setempat/kota</p> <p>10. Tersedianya data dan informasi perubahan tenaga operator atau teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan Pelatihan Kerja (PPK) yang</p>	<p>diorganisasi oleh instansi yang menyelenggarakan studi, asesmen, analisis, perencanaan tinggi dan inspeksi pemeliharaan lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang sudah di wilayah kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan sertifikasi pelatihan operator dan insinyur/medis</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terampil yang tersertifikasi oleh lembaga/instansi/medis di wilayah kabupaten/kota</p>
--	---

	<p>14. Tersedia data dan informasi badan usaha yang mendapatkan penerapan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>14. Tersedia data dan informasi penambahan komitmen permodalan RUP badan usaha dan TUMP yang disetujui</p> <p>15. Tersedia data dan informasi hasil pengawasan ketidakepatuhan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>
	<p>16. Tersedia data dan informasi ketidakepatuhan standar pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedia data dan informasi hasil pengawasan ketidakepatuhan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki RUP di wilayah kabupaten</p> <p>19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki RUP di wilayah kabupaten/kota</p>

<p>20. Adalah badan usaha yang memiliki UMRK yang terdapat dalam proyek di wilayah kabupaten.</p> <p>21. Adalah badan usaha yang mendepankan pertumbuhan di wilayah kabupaten.</p> <p>22. Adalah perusahaan rintisan kecil/kecilan pemodalannya U.M.K. badan usaha dan TUMK yang disetujui.</p> <p>23. Adalah pengasasan terkait ketidakeconomic jenis, sifar, klasifikasi, ukuran usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegunaan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.</p>	<p>24. Adalah ketentuan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.</p> <p>25. Adalah pengasasan terkait ketidakeconomic jenis, sifar, klasifikasi, ukuran usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segala bentuk pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.</p> <p>Besarnya proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya hanya kecelakaan konstruksi</p> <p>Jumlah proyek yang terjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi berdasarkan konstruksi</p> <p>$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.</p>
--	--

d) Perumahan Rakyat (Bobot Urusan : 18%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penugasan/nya. 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100 \%$ Jumlah awal rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	20%

7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 8. Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi 9. Jumlah lokasi dan lokasi pencahangan lahan	harus/relokasi sesuai dengan rencana aksi			
--	---	--	--	--

1. Jumlah rumah tenaga penerima layanan yang telah mendapatkan kestrans ganth berdasarkan rencana penempatan ISM 2. Jumlah rumah tenaga penerima tegantar byanan yang telah mendapatkan	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi rumah penduduk kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tenaga Penerima Subsidi Uang Sewa + Jumlah Tenaga Penerima Fasilitas Rumah Layak Huni $\text{-----} \times 100 \%$ Jumlah total rumah tenaga	20%
--	--	---	-----

<p>hasil dari penggantian hal-hal atau rumah atau/atau bangunan berdasarkan rencana pemukiman SPM</p> <p>3. Jumlah rumah tangga penerima layanan subsidi rumah yang sudah selesai sesuai rencana pemukiman BUM</p> <p>4. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemukiman SPM</p> <p>5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemukiman SPM</p>	<p>tertera rencana program Pemukiman Daerah yang memuat kriteria pelaksanaan</p>
<p>6. Jumlah total luas lahan (Ha) pengalihan tanah</p> <p>7. Jumlah lahan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha</p> <p>8. Jumlah unit penyediaan kualitas KPH</p> <p>9. Jumlah rumah (Ha) persangan infrastruktur kawasan kumuh</p>	<p>luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (Ha)</p> <p>$\frac{\text{luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}}{\text{luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$</p>
<p>4. 1. Jumlah rumah tidak layak huni</p> <p>2. Jumlah unit PNFT/ unit PTH (Rumah tidak layak huni)</p> <p>3. Jumlah rumah tidak layak huni</p> <p>4. Jumlah rumah yang tidak layak huni</p> <p>5. Fisik rumah dan KK</p> <p>6. Jumlah rumah penduduk</p>	<p>Jumlah unit rumah tidak layak huni</p> <p>$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100\%$</p>

5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSC 2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi akses jalan 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi dan air minum 5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSH (Pasarsana, Skema dan Utilitas Rumah) 6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses LUP 7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 8. Jumlah pengembang yang teregistrasi 9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan 	<p>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSC</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah unit rumah saat/jika}} \times 100\%$
----	---	--

e) Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Perindungan Masyarakat (Bobot Urusan : 6%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan tantibum dalam kab/kota yang ditangani 2. Jumlah Satisfians yang terlaksana dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditagalkan 4. Jumlah Polisi Bantuan Desa yang memiliki kualitas sebagai PINS 5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan tantibum 6. Tersedianya sarana pelayanan minimal 	<p>Persentase Gangguan Tantibum yang cepat diselesaikan</p>	<p>Jumlah pengaduan yang ditangani</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	14%
2.		<p>Persentase Perda dan Perkada yang</p>	<p>Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditagalkan</p>	14%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan diwartakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi media bencana sesuai jenis ancaman bencana 	<p>dianggalkan</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</p>	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Peraturan yang memuat sanksi}} \times 100\%$	14%
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Rencana sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p>	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p>	14%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan sosialisasi penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat pelatihan perlindungan 			
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>	14%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			
	4. Persentase jumlah korban berhasil dievakuasi, ditolong dan dibantu terhadap kejadian bencana			
6.	<p>1. Jumlah dan jenis kegiatan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darat atau kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota</p> <p>2. Tersedianya pos safety damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar,</p>	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Jumlah kegiatan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah kegiatan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk	14%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	1. Tersedianya sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	
	2. Tersedianya aparat selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		----- x 100%	
	3. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kecamatan/desa.		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	
	4. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			
	5. Jumlah aparat pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur PNS dan PNS Kebakaran</p> <p>7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Pengendalian Stm (prangkar) daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran</p> <p>8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran</p>			
7.		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dilatih oleh _deposan, penyisipan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	1455

1) Sosial (Beban Urusan : 5%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
1.	<p>1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang diteliti</p> <p>2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu EM dan OTM</p> <p>3. Jumlah tim/keksi Cepat yang dibentuk</p> <p>4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</p> <p>5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kearsifan yang</p>	<p>Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantai (indikator SPM)</p>	<p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantai</p> $\frac{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng}} \times 100\%$	50%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dinikmati			
6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket perumahan sesuai standar gdi			
7.	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			
8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket bantuan			
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memantapkan alat bantu			
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter			
11.	Jumlah paket perlengkapan kesehatan yang tersedia			
12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memantapkan paket perlengkapan kesehatan			
13.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah			
14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau YKS			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ebat
	dan/atau relawan sosial yang disediakan			
13.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Sungsang/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			
15.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			
17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Ebat
	terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			
18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan pemukiman keluarga			
23.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang diidentifikasi dengan keluarga 21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, orang terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang diujuk			
2.	1. Jumlah korban bencana yang mendapat akses 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan prangogi yang dimiliki	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan	50%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	4. Jumlah paket permukiman khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 6. Jumlah Penerima Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/staf relawan sosial yang tersedia		Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.	

Usulan Pemerintah Wajib Tidak Berikan Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja (Bobot Usulan : 3%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Formula	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota. 	<p>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mencakup ke-3 rencana tenaga kerja</p>	<p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke BTKD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota</p>	
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penerapan Program PDK dengan kualifikasi kelas 2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 4. Persentase LPK yang tersakreditasi 5. Persentase LPK yang merahib 	<p>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</p>	<p>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</p>	23%
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penganggur yang dilatih 2. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 3. Persentase penerapan lulusan 4. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah calon Pekerja Migran Indonesia (PMDI) atau Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk pelatihan 11. Jumlah pelatihan vokasi Pekerja Migran Indonesia (PMDI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 	<p>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<p>Nilai tahun berjalan atas dasar harga konstan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah tenaga kerja</p>	23%

4.	<p>1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Rastuzen Perusahaan (R)</p> <p>2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</p> <p>3. Pakaj'ubasi telu su jumlah keafidensi SP/SH yang tercatat, kedusa SP/SH yang tercatat, SP/SH di perusahaan yang tercatat, SP/SH di luar perusahaan yang tercatat dan angore SP/SH di perusahaan</p> <p>4. Persentase perusahaan yang sudah menguasi am-kur skala upah</p> <p>5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kefesukakatu</p>	<p>Persentase Perusahaan yang memuatsekan tca kode kerja yang banyak</p> <p>[TYPK, LIS Bupatu, Struktur Skala upah dan terdaftar peserta BPJS Kefesukakatu]</p> <p>Jumlah Perusahaan yang memuatsekan tca kode kerja yang banyak</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Perusahaan</p>	20%
----	---	---	-----

	<p>6. Persentase jumlah perusahaan yang beradisi</p> <p>1. Jumlah angak kerja</p> <p>2. Jumlah penutu-pau perusahaan</p> <p>3. Jumlah perselisihan kepau-pau</p> <p>4. Jumlah perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buru (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan</p> <p>5. Jumlah perselisihan PHK</p> <p>6. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PUR</p> <p>7. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui penning, et upau</p> <p>8. Jumlah raja tawu (R) upau Kabupaten/kota yang dibeayskatu</p>		
--	---	--	--

<p>2</p>	<p>1. Persentase persentase hubungan industrial yang sudah selesai melalui Penyaluran Kesempatan Melalui Hubungan Industrial</p> <p>1. Jumlah anggaran kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Jumlah peserta kerja yang terdaftar di kab/kota</p> <p>3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota</p> <p>4. Jumlah angsa kerja Khusus terdaftar dalam satu kab/kota/kota</p> <p>5. Jumlah Daftar Fungsional Pengantar Kerja</p> <p>6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja</p>	<p>Bersama-sama Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)</p> <p>atas satu kecamatan layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah peserta kerja (peserta kerja) yang ditempatkan x 100%</p> <p>Jumlah peserta kerja yang terdaftar</p>
----------	--	---	--

	<p>sewa (PKTS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota</p> <p>7. Jumlah pejuang sero yang dituliskan oleh dinas bidang keterampilan kab/kota</p> <p>8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Inovasi Pasar Kerja (IPK) Online (SINERGI)</p> <p>9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan sosialisasi</p> <p>10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terdaftar</p>		
--	---	--	--

	<p>11 Jumlah Calon Peserta Magang Indonesia (PMI)/Calon magang kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pelatihan kepelangan</p> <p>12 Jumlah Calon Peserta Magang Indonesia (PMI)/Calon magang kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja</p> <p>13 Data pembudayaan Peserta Magang Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) utama dan keluarganya</p> <p>14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTA) yang diberikan</p>		
--	--	--	--

g) Peningkatan Percepatan dan Perlindungan Anak (Bobot Utusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih POG</p> <p>2. Jumlah program POG ada perangkat daerah yang sudah diwawasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota</p>	<p>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</p>	<p>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh belanja langsung APBD</p>	33%
2.	<p>1. Jumlah media massa cetak, elektronik yang bekerja sama dengan pemerintah (class paper) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak</p> <p>2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</p>	<p>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten</p>	<p>Jumlah anak penduduk usia kurang dari 18 tahun korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didaftarkan ----- x 100%</p> <p>Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)</p>	33%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota [APFD kab/kota]			
3.	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPU (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengislati kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	33%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	yang sudah dilatih 3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan 4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPU pada perspektif daerah yang sudah dievaluasi 6. Jumlah lembaga pelayanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
7.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani			

h) Pangan (Habit Jirsan : 33%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi: perubahan dan sarana pendukung lainnya untuk pengimporan cadangan pangan 2. Tersahitkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4. Terlaksananya kegiatan perdagangan masyarakat dalam rangka pemenuhan 	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	100%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kurangnya pangan yang beragam dan bergizi seimbang 6. Tersedianya pers ketahanan dan ketersediaan pangan 7. Tertanggungnya kerawanan pangan 8. Tersahitkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 9. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar 			

l) Pertanahan (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Bupati/Wali Kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi x 100%	
	2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Objek Landreform yang bersumber dari Tanah Kekayaan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	bandanya diatas lain lokasi dibandingkan dengan luas lain lokasi yang diterbitkan	seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	
2.	3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Garansi Uang Kepada Bekas Pemilik Tanah Kekayaan Maksimum/Absentee.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100%	
	4. Dokumen Izin membuka tanah	Tersedianya lahan pembangunan dalam rangka penataan model	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	
3.	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah		Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4.	Kabupaten/Kota	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TO) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kekayaan Maksimum dan Tanah Absentee x 100%	
			Luas lain lokasi yang diterbitkan	
5.		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Jumlah penerima tanah objek landreform dengan luas yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha, x 100%	
			Jumlah penerima tanah objek landreform	
6.		Perangan sengketa tanah garapan yang ditangani melalui	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin Membuka Tanah x 100%	
			Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	
			Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani x 100%	

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		tersedia	jumlah terjadinya sengketa tanah garapan	

j) Lingkungan Hidup/Bobot Urusan : 39%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		33%
2.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total Vol sampah yang dapat diangkut ----- x 100% Total vol treatment sampah kabupaten/kota	33%
3.	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Ketersediaan penanggung jawab usaha dan/atau	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	33%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	pemerintah daerah kabupaten/kota.	kegiatan terhadap izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota ----- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemertasaan	
2.	Kesejahteraan pegawai LA di daerah (PPLH) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota			
3.	Pemertasaan hak MPA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota.			
4.	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga-lembaga yang diterbitkan direkt			
5.	Penanganan Pengaduan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUD LH yang di tertatkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.			

k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bobot Urusan : 25%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta percerahan 3. Penerbitan akta kematian 4. Pengajian data kependudukan	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	25%
2.		Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	25%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		Kependudukan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	25%
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan pejaanjan kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah OPD	25%

l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bobot Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah desa yang difasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan diluarangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	Persentase pengurangan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Masyarakat per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per awal tahun t)	25%
2.		Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri	50%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ Jumlah desa berkembang (per-sewed tahun ini)	

m) Penguatan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bobot Urutan : 2%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Periksa 2. Median Usia Kawin Pertama Berencana (MUKP) sebesar wanita umur 25-19 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun A_{15-19}	TFR (Angka Kelahiran Total)		33%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	Specific Fertility Rate /SFR 15-19 4. Pensekuse masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBPK (edukasi dan EIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KBPK			
2.	1. Pensekuse Fasilitas Kesehatan (Kaster) yang siap melayani KB MKJP 2. Pensekuse Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ Jumlah Pasangan Usia Subur	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	3. Fungsional Daerah Provinsi yang memiliki Kelempak Kerja EKBPk yang efektif			
	4. Peningkatan pelayanan KH Desa, Pesisiran			
3.	1. Peningkatan kesetaraan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesetaraan rendah 2. Peningkatan kesetaraan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (jumlah need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak melayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	38%

n) Perhitungan (Bobot Urutan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Rasio Inspektabilitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten Kota = $\frac{IK1 \times \text{Bobot angkutan jalan} - IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan}}$	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala		penyeberangan] = $\frac{IK1 \text{ (angkutan jalan)} - (\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{Bobot trayek}) \text{ dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)}}{IK2 \text{ (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)} = \frac{\text{jumlah Jintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb} \times \text{Bobot Jintas}) \text{ dibagi (jumlah kebutuhan jintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)}}{Konektivitas}$	
	3. Penerapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi			
	4. Peningkatan pelayanan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IKK (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik 	

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
			<p>lintas penyeberangan, perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang ditersarakan dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>Beban Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan [beban angkutan SLP = 70, beban angkutan jalan = 30] 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan 	

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			<p>diandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SLP = 0, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SLP = 30, bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SLP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>=4 dalam seminggu), bobot = 1</p>	

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			<p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0,5</p>	
3.		Kinerja bus lintas kabupaten/kota	V/O Rasio di dalam kabupaten/kota	20%

a) Komunikasi dan Informatika (Bobot Total = 5%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	35%

No	BKR Output	BKR Outcome	Rumus	Bobot
2.	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo			
3.	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
3.	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan offline dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	35%

No	BKR Output	BKR Outcome	Rumus	Bobot
	domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015			
	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar			
	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
	4. Persentase layanan SPSE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dalam dokumen proses bisnis yang			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	telah diimplementasikan secara elektronik			
	5. Persentase layanan SPSE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang menggunakan sertifikat elektronik			
	6. Persentase sistem elektronik yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dalam sistem penghubung layanan pemerintah			
	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Pobot
	9. Persentase perangkat daerah yang menyalurkan data di pusat data pemerintah			
	10. Persentase perangkat daerah yang memperhalusi datanya sesuai siklus jenis data (sesuai rencana kinerja)			
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai			
	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city			
	13. Persentase ASN pengelola IIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas kinerja			
	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan			

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
	kepala daerah terkait implementasi e-government			
3	<p>4. Persentase komunikasi masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota</p> <p>5. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</p> <p>6. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan</p>	<p>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebutan informasi publik, mengadun kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebutan informasi publik, mengadun kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</p> $\frac{\text{.....}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	30%

pl Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Beban Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
1.	<p>1. Persentase fasilitasi pemberian ijin usaha stanpa pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah kewangsaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Persentase fasilitasi pemberian ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha stanpa pinjam untuk koperasi dengan wilayah kewangsaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>3. Persentase pemeriksaan dan pengumuman yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah kewangsaan dalam</p>	<p>Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</p>	<p>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan KAT, wah me usaha dan aset</p> $\frac{\text{.....}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	30%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	daerah/kabupaten/kota			
4.	Persentase usaha sipan panjara oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
6.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			
9.	Persentase fasilitasi pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
	dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kemandirian dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas komitansi untuk koperasi			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
	dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
2.	<ol style="list-style-type: none"> Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berkala mikro Persentase jumlah usaha mikro yang terdapat ke dalam sistem online data system (ODS) Persentase jumlah usaha mikro yang bernilai Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan 	<p>Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</p>	<p>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha $\frac{\text{.....}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$</p>	30%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
	dukungan fasilitasi penanaman modal			
	b. Sasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi realistik			
	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan			

q) Penanaman Modal (Beban Urusan : 3%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
1.	1. PPKDA mengawal pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1}{\text{jumlah investasi tahun } n-1} \times 100\%$	1,00%
	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian		Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Beban
	fasilitas insentif penanaman modal			
	d. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal			
	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting			
	5. Kegiatan pameran penanaman modal			
	6. Kegiatan penertarikan minat penanaman modal			
	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal			
	8. Penertarikan perizinan dan non perizinan penanaman modal			
	9. Laporan evaluasi penanaman modal			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota			
	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN			
	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota			

r) Kepemudaan dan Olahraga (Bobot Urusan : 2%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang terstimulasi di prestasi x 100% Jumlah pemuda umur 16-30 tahun di kabupaten/kota	33%
2.	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader	Tingkat partisipasi pemuda dalam	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada	33%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	1. penguatan kepemimpinan, kepekaan, ketahanan dan keaktifan pemuda 2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	
3.	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di seluruh pertandingan 2. Jumlah penyelenggara event OR prestasi tingkat daerah	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	33%

s) Statistik (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari HPS 5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari HPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah $\frac{\dots}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$	50%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah $\frac{\dots}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$	50%

t) Persandian (Bobot Urusan : 2%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan siber dibanding besarnya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan 2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan aman aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 3. Persentase sistem elektronik/aspek informasi yang telah diaudit dengan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi $\frac{\dots}{\text{jumlah area persandian}} \times 100\%$	100%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	resiko kategori rendah 4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Atribungan Komunikasi Sondi (PACS) yang ditetapkan			

4) Kebudayaan/Bobot Urusan : 25%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2. Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang	Terlaksananya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdalu	1,00%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dikembangkan (penyebarluasan, pengujian, penyediaan ketetapan) 3. Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 4. Jumlah SDM, lembaga dan prestasi yang dibangun (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian,			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Robot
	penetapan, pencabutan, peneringkatan, penghapusan]			
6.	Perlindungan cagar budaya provinsi (pencabutan, revisi, pemeliharaan dan pemugaran)			
7.	Layanan perjalanan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data			
8.	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, rekonstruksi, adaptasi)			
9.	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			
10.	Pengelolaan pengamanannya			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Robot
	pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			
11.	Peringatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan			
12.	Peringatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota			
13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya			
14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi			
15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya			
16.	Penetapan sdm cagar budaya			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	dan pen museuman			
	17. Peningkatan kompetensi sdm. engg budaya dan pen museuman kabupaten/ kota			
	18. Peningkatan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan pen museuman			
	19. Peningkatan legislasi museum yang melibatkan masyarakat			

g) Perpustakaan (Bobot Urusan : 2%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1. Nilai angka legemaran membaca masyarakat		50%
	2. Persentase ketermanfaatan koleksi perpustakaan oleh	2. Indeks Perbaikan Literasi Masyarakat		50%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	masyarakat			
	3. Rasio ketercukupan teroga perpustakaan dengan penduduk			
	4. Persentase perustakan sesuai standar nasional perpustakaan			
	5. Jumlah pemasyarakatan genre minoritas di masyarakat			
2.	1. Jumlah naskah kuno yang didigitasi/ diath media (digitisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya			
	2. Jumlah naskah kuno yang diath akses dan diath indeks			
	3. Jumlah koleksi budaya etnis masyarakat yang terdipaparkan			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Bentuk	Bobot
	dan/atau terdapat yang ada di wilayahnya (term)			

w) Kesiapan (Bobot Persepsi : 25%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Bentuk	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase arsip aktif yang telah dibuktikan daftar arsip 2. persentase arsip in aktif yang telah dibuktikan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuktikan sarana bentuk term belik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SKN melalui JKN 	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban maksimal Pasal 49 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = \frac{(a + i + s + j)/4}{4}$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuktikan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuktikan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuktikan sarana bentuk term belik j = persentase jumlah arsip	50%

No	IKK Output	IKK Outcome	Bentuk	Bobot
			yang dimasukkan dalam SKN melalui JKN	
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemertanian arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Bangkasan arsip persangka daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemecaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi 4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kesiapan provinsi yang sesuai NSPK 5. Pencarian arsip statis yang 	Tingkat keberadaan dan ketuntasan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berkegiatan dan kemampuan untuk kepentingan pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	$T = \frac{(m + b + g + a + e + h)/6}{6}$ T = tingkat keberadaan dan ketuntasan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemertanian arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan pemertanian arsip persangka daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemecaran daerah	50%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Skala	Bobot
	<p>pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan tinggi dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK.</p> <p>6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kesugihan daerah provinsi yang sesuai NSPK.</p>		<p>kabupaten/kota dengan NSPK</p> <p>a - tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c - tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>1 = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	

Urutan Bilangan

g) Keluasan dan Perikanan (Bobot Urutan : 25)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Skala	Bobot
1.	<p>1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTU)</p> <p>2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional</p> <p>3. Jumlah Bin Usaha Perikanan (BUH) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diteliti</p> <p>4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan</p>	<p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data IKK)</p>	<p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data IKK)</p>	005

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rencana	Bobot
	pendampungan/ kemitraan usaha/ pencucuhan akses iptec dan internet/dan penguatan kelen bagasari			
	5. Jumlah pembeli budidaya air tawar dari air payau yang di produksi.			

b) Pariwisata (Bobot Urusan = 3%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rencana	Bobot
1.	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah ketengkapan infrastruktur dasar, fasilitas utama, dan fasilitas pariwisata.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) / Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	20%
2.	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Persentase peningkatan perijinan wisatawan nusantara yang datang	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) / Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	20%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rencana	Bobot
4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	ke kabupaten./kota	Jumlah wisatawan tahun n-1	
5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual / Jumlah kamar yang tersedia x 100%	20%
6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	20%
7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	20%
8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi			
9.	Persentase SDM peserta pembelajaran sektor kepariwisataan			

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kewirausahaan usaha masyarakat			

d) Pertanian [Bobot Urusan : 25%]

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Pemasaran pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase pemasaran yang digunakan 5. Persentase jumlah usaha izin usaha pertanian di kab/kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun $\frac{\text{Produksi}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	50%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
2.	1. Persentase fasilitas penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) $\frac{\text{Jumlah kejadian/kasus}}{\text{Jumlah kejadian/kasus}} \times 100\%$ Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	50%

d) Kelautan [Bobot Urusan : 20%]

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			

e) Energi dan Sumber Daya Mineral (Bobot Urutan : 35%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	Pencarbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kab/Kota	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki Ijin di Kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	100%

f) Perdagangan (Bobot Urutan : 38%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan, untuk izin : <ol style="list-style-type: none"> a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan 2. Persentase pencarbitan TDG 3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 4. Persentase pencarbitan STPW yang tepat waktu untuk: 5. Persentase pemribesannya 	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (UUP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan UUP/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota}} \times 100\%$	33%

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota 6. Persentase pencarbitan SBK yang tepat waktu 7. Persentase pengendalian dan pengolahan sumber distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu 			
2.	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	33%
3.	1. Persentase alat-alat ukur, timbangan dan perlengkapan (UTP) yang	Persentase alat - alat ukur, timbangan dan perlengkapan lainnya (UTP)	$\frac{\text{Jumlah UTP Berisada Timbangan yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{.....}} \times 100\%$	33%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>diteraj/tera ulang dalam tahun berjalan</p> <p>2. Persentase kesesuaian BKRT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku</p>	<p>bertanda tera sah yang berlaku</p>	<p>jumlah potensi UTP yang wajib diura dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota</p>	

g) Perindustrian (Bobot Ilustrasi : 33%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.	<p>1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (PKI) yang dilaksanainya di daerah kabupaten/kota</p>	<p>Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi</p>	<p>Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-1</p> <p>..... x 100%</p> <p>Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-1</p>	17%
2.	<p>1. Persentase terselesaikannya dokumen RTRK sampai dengan diadakannya menjadi PERDA</p>	<p>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri ternesek turunan indikator</p>		17%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.	<p>1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (UI) kecil dan UM menengah yang diterbitkan</p> <p>2. Persentase jumlah izin perluasan industri (PIU) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan</p>	<p>perencanaan industri dalam RPJN yang ditetapkan dalam RPJPD</p> <p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</p> <p>..... x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	17%
4.		<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (PIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p>	<p>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</p> <p>..... x 100%</p> <p>Jumlah izin yang dikeluarkan</p>	17%

No	IKK Output	IKK Outcome	Bentuk	Bobot
5.		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perusahaat Kawasan Industri (PKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan x 100% Jumlah izin yang dikelolakan	17%
6.	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam EIT. Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-5 bulan Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan Informasi produksi dan kapasitas produksi Informasi bahan baku dan bahan penolong Informasi bahan bakar/energy Informasi tenaga kerja	17%

No	IKK Output	IKK Outcome	Bentuk	Bobot
			Informasi investasi	

b) Transmigrasi (Kohar Urusan : 15%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Bentuk	Bobot
1.	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya 2. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan permukiman yang dibina			

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Bobot : 10%)

a) Perencanaan dan Keuangan (Bobot Urusan : 30%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Formula	Bobot
1.		Rasio Belanja Pegawai dan guru dan tenaga kependidikan	Jumlah belanja pegawai, guru dan tenaga kependidikan ----- x 100 %	16,7%
2.		Rasio PAD	Jumlah APBD Jumlah PAD ----- X 100%	16,7%
3.		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	16,7%
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	16,7%

No	IKK Output	IKK Outcome	Formula	Bobot
4.		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dilarang transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100%	16,7%
5.		Opini Laporan Keuangan	jumlah belanja APBD Opini Laporan Keuangan	16,7%

b) Pengadaan (Bobot Urusan : 10%)

No	IKK Output	IKK Outcome	Formula	Bobot
1.		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang diawasi ke tahun berikutnya yang dilaksanakan pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang pada perbandingan dalam 3 kuartal yang dilaksanakan pada kuartal pertama tahun n ----- X 100%	33%
2.		Persentase jumlah pengadaan yang	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	33%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
		dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan}} \times 100\%$	
3.		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{total belanja langsung}} \times 100\%$	35%

c) Kepegawaian (Bobot Urutan : 20%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas}}{\text{Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$	35%
2.		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas}} \times 100\%$	35%

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
			$\frac{\text{seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas}} \times 100\%$	
3.		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	35%

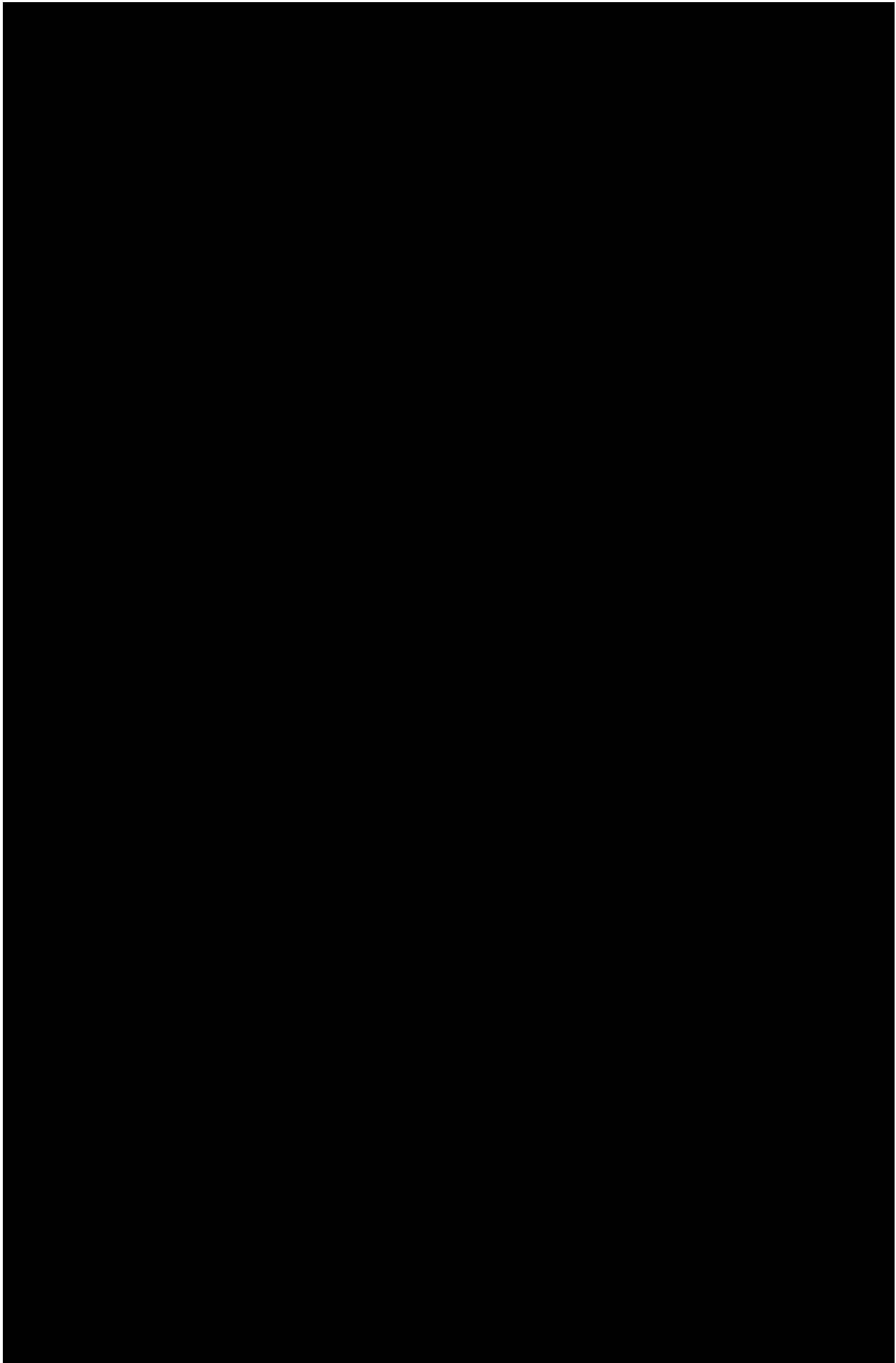
d) Manajemen Keuangan (Bobot Urutan : 30%)

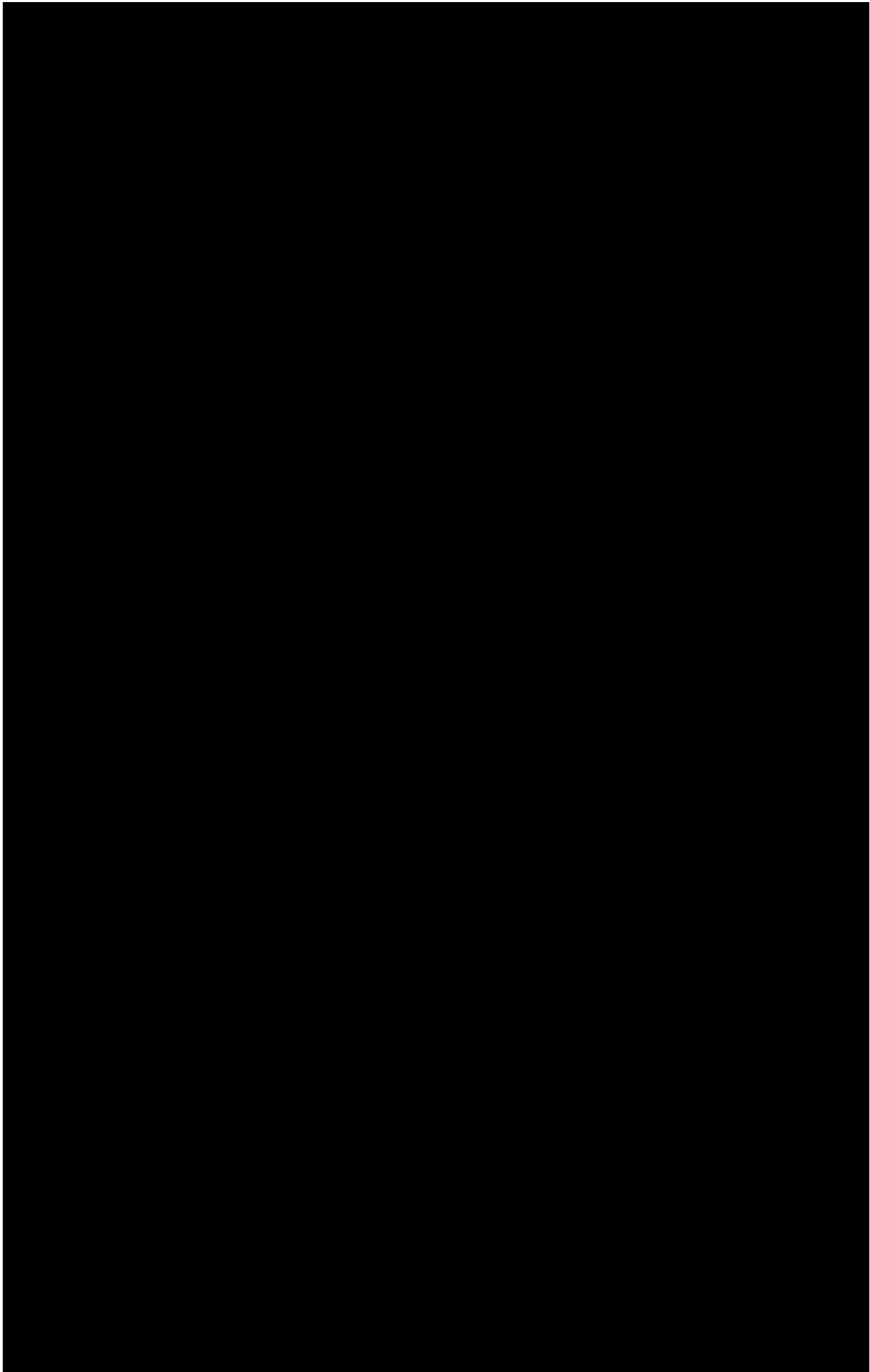
No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi}}{\text{total belanja APBD dikurangi satu}} \times 100\%$	25%
2.		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi}}{\text{dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100\%$	25%

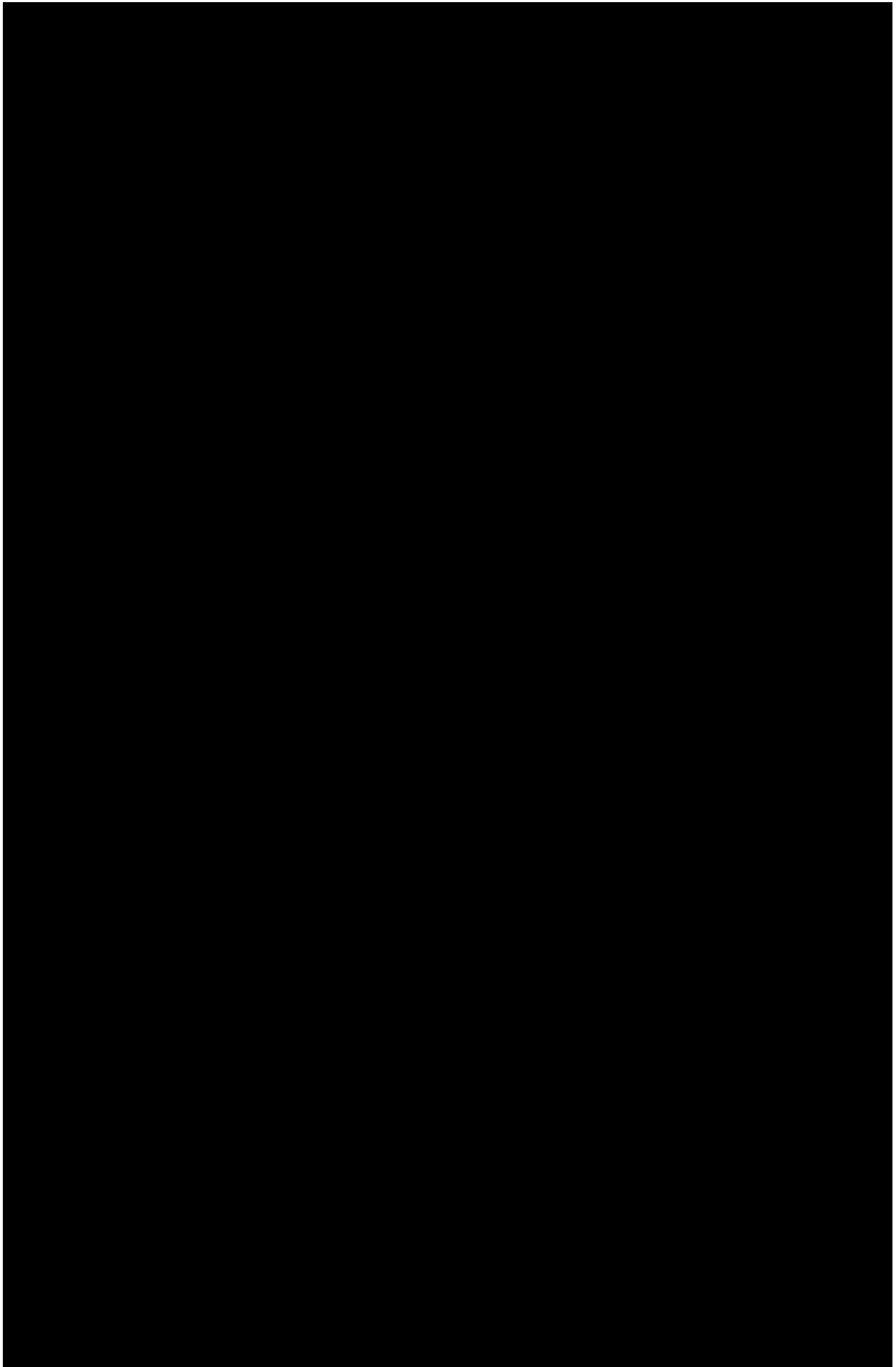
No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
3.		Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	25%
4.		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	25%

e) Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot Urutan : 20%)

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1.		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100\%$	50%
2.		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda}}{\text{total jumlah dokumen yang telah di-ini}} \times 100\%$	50%







2. Penghitungan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan Peringkat.

Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Ilustrasi sebagai berikut:

$$KPPD = [OKM + OKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$$

Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota.

3. Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN